

**PERENCANAAN PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21  
PADA PERUSAHAAN JASA PERBANKAN**

**(Studi Kasus Pada PT X)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**Brian Yudhistira**

**NIM. 135030407111029**



**PROGAM STUDI PERPAJAKAN  
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

**2017**

**MOTTO**

**“WHEN WE REALIZE HOW LITTLE WE MEAN TO THE UNIVERSE,  
WE REALIZE HOW IMPORTANT WE ARE TO EACH OTHER”**

**-TOM DELONGE-**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Jasa  
Perbankan (Studi Pada PT X)

Disusun oleh : Brian Yudhistira

NIM : 135030407111029

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 21 November 2017

Komisi Pembimbing  
Ketua

**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA**  
**NIK. 2013048703162001**



## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 30 November 2017

Nama : Brian Yudhistira

NIM : 135030407111029

## RINGKASAN

Brian Yudhistira, 2017, **Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Jasa Perbankan** (Studi Kasus Pada PT X) Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak., CA

Atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran pajak perusahaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memberikan solusi terkait perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Karena apabila PT X memberikan tunjangan pajak kepada karyawan seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, maka dengan cara ini, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya di tanggung oleh PT X akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan (tunjangan pajak ikut dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh terlebih dahulu dan dihitung pula Pajak Penghasilan Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada situs penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara PT X serta data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan arsip-arsip yang mempunyai kaitan dengan penelitian. Kemudian analisis data dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dasar pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya yang pertama adalah PT X memilih untuk menanggung seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para karyawan PT X lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar. Perencanaan pajak yang efektif untuk PT X dimana setiap tahunnya PT X rutin memproses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 secara tepat waktu, serta efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X lebih fokus kepada memanfaatkan aturan-aturan yang berlaku di dalam perpajakan seperti definisi dalam PPh Pasal 21 yang ditinjau dengan melihat sisi PTKP terhadap masing-masing karyawannya.

## SUMMARY

Brian Yudhistira, 2017, **Tax Planning for Income Tax Article 21 in Company Banking Service** (Case Study at PT. X) Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak., CA

Based on the importance of tax planning to fulfill tax obligation of taxpayer and related to firm's tax savings, author was interested to study and give solution related with tax planning of PT. X through the calculation of Income Tax Article 21 of its employees. If PT. X give tax benefit toward its employees, such as transport benefit, lunch benefit, position benefit and other benefits, therefore Income Tax Article 21 that actually paid by PT. X would be put first into payroll and benefits element for employees during calculation of Income Tax Article 21 (Income Tax Article 21 was also calculated for tax benefits). It is as if employees receive Income Tax benefit first and its Income Tax Article 21 was also being calculated, and then discounted again by the firm.

This study used descriptive study with qualitative approach. Data was obtained through observation, interview and documentation at study site. Source and type of data used in this study were primary data from interview in PT. X and secondary data from documents, notes, reports and archives related with the study. Data analysis in the study used qualitative approach directly after entering the field, and after completing it in certain intervals. This study used analysis technique suggested by Miles and Huberman (1984) in Sugiyono (2009), that activity in qualitative data analysis was done interactively and continuously until completion, thus obtain saturated data.

Result of this study found out that basic consideration of PT. X in paying Income Tax Article 21 of its employees were firstly, PT. X chose to pay all tax load of its employees, with the expectation that their employees would be more focus in their work and achieve the target to obtain net payroll without thinking about their tax load. Effective tax planning for PT. X whereas annually PT. X processing its Income Tax Article 21 on time, and efficiency of tax planning in PT. X was focused more on utilizing rules in taxation such as definition in Income Tax Article 21 reviewed by looking at PTKP element for each of its employees.

**ATAS LIMPAHAN BERKAT RAMHAT ALLAH SWT  
KUPERSEMBAHKAN KARYAKU INI  
KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA,  
ADIKKU TERSAYANG,  
SERTA SAHABAT-SAHABATKU**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahamt dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Jasa Perbankan (Studi pada PT X)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak M. AL Musadieq, Dr, MBA selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, MS selaku ketua program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE, MSA.,Ak.,CA, selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, motivasi, mengarahkan dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Keluarga tercinta Penulis, Bapak Sulam Andjar Rochim, Ibu Tiara Pengayom dan Adik Patria Azzahra Maharani yang senantiasa memberikan kasih sayang serta do'a yang tak ternilai, motivasi dan dorongan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi perpajakan ini;
6. Teman-teman seperjuangan seimbang dari dosen pembimbing penulis terima kasih arahan, referensi, bimbingan, motivasi dari kalian semua terima kasih kepada ; Helwinda, Kukuh, Bayu, Deni, Rossi, Edo, Ines, Pras, Nurhadi, Devita, Viby, dan Laily. Terima kasih banyak untuk kalian sampai ketemu di puncak;
7. Teman-teman penulis selama berada dikampus ini, seluruh teman perpajakan angkatan 2013 yang berjuang bersama penulis, dan memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman BPN : Ance, Demas, Mawan, Rindang, Tegar dan Yure;
9. Teman-teman Djoyo Squad : Dio, Yudha, Kilim, Evan, Roi dan Audrey;
10. Teman-teman Sok Yes : Hellenia Merrytha, Elok, Risma, Alief, Hana, Afri, Raka, Iwan, Ganefis, Agung. Terima kasih banyak untuk kalian semua;

Kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 November 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris .....	8
1. Penelitian Terdahulu .....	8
2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang .....	10
B. Kajian Teoritis .....	12
1. Perencanaan Pajak .....	12
a. Pengertian Perencanaan Pajak .....	12
b. Tahapan Perencanaan Pajak .....	14
c. Fungsi Perencanaan Pajak .....	17
d. Aspek Formal, Aspek Administratif, dan Aspek Material Perencanaan Pajak.....	18
e. Strategi Perencanaan Pajak .....	21
f. Tingkatan Strategi Perencanaan Pajak .....	22
g. Langkah-langkah Dalam Perencanaan Pajak .....	23
2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
b. Pengertian Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.....	27
c. Pemotong Pajak.....	27
d. Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29
e. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja.....	30

f.	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Yang Menerima Tunjangan Pajak .....	31
g.	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Sendiri Oleh Karyawan .....	33
h.	Tarif Pajak dan Penerapannya.....	34
i.	Tarif PTKP dan Tarif Pasal 17 UU PPh.....	37
3.	Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan .....	38
a.	Biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.....	38
b.	Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto .....	40
c.	Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	41
4.	Perbankan .....	43
a.	Pengertian Perbankan .....	43
b.	Fungsi Bank .....	43
c.	Jenis-Jenis Bank .....	45
d.	Risiko-risiko Dalam Usaha Perbankan .....	47
5.	Kerangka Pemikiran .....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	53
B.	Fokus Penelitian .....	54
C.	Lokasi dan Situs Penelitian .....	54
D.	Sumber Data .....	55
E.	Instrumen Penelitian .....	56
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	57
G.	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif (Keabsahan Data).....	59
H.	Metode Analisis Data .....	60

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
1.	Gambaran Umum Kota Surabaya .....	64
a.	Geografis Kota Surabaya .....	64
b.	Visi dan Misi Kota Surabaya .....	66
2.	Gambaran Umum PT X .....	67
a.	Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha PT X .....	67
b.	Budaya Perusahaan .....	71
c.	Struktur Organisasi Divisi Akuntansi dan Perpajakan di PT X .....	72
B.	Penyajian Data .....	72
1.	Dasar pertimbangan PT X Dalam Menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	72
1.1	Kebijakan PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawannya .....	72
1.2	Metode Yang Digunakan Oleh PT X Terhadap PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan .....	75
2.	Perencanaan Pajak Yang Efektif Untuk PT X.....	76

2.1 Alur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT X .....	76
2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 di PT X .....	78
2.3 Perencanaan Pajak PPh 21 Yang Dilakukan Oleh PT X .....	82
2.4 Efisiensi Perencanaan Pajak Yang Dilakukan Oleh PT X .....	83
3. Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT X .....	84
4. Rincian Laporan Laba Rugi PT X (Sebelum dan Sesudah Dilakukan Koreksi Fiskal).....	88
C. Analisis Data .....	93
1. Dasar pertimbangan PT X Dalam Menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	93
1.1 Kebijakan PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawannya .....	93
1.2 Metode Yang Digunakan Oleh PT X Terhadap PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan .....	94
2. Perencanaan Pajak Yang Efektif Untuk PT X.....	95
2.1 Alur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT X .....	95
2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 di PT X .....	96
2.3 Perencanaan Pajak PPh 21 Yang Dilakukan Oleh PT X .....	98
2.4 Efisiensi Perencanaan Pajak Yang Dilakukan Oleh PT X .....	99
3. Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT X .....	100
4. Perbandingan Tiga Metode Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan di PT X .....	102
5. Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Karyawan PT X .....	105
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Gross Method</i> .....	106
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Net Method</i> .....	107
c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i> .....	108
d. Perbandingan Perhitungan Tiga Metode Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	110

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	8
2. Tabel 2 Contoh Perhitungan Net Method .....	31
3. Tabel 3 Contoh Perhitungan Gross Up Method .....	32
4. Tabel 4 Contoh Perhitungan Gross Method .....	33
5. Tabel 5 Tarif PTKP .....	37
6. Tabel 6 Tarif Pemotongan Pajak .....	37
7. Tabel 7 Perhitungan Net Method Yang Dilakukan Oleh PT X .....	81
8. Tabel 8 Laporan Laba Rugi Sebelum Koreksi .....	37
9. Tabel 9 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menggunakan Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 (Dalam Rupiah).....	102
10. Tabel 10 Perhitungan Gross Method .....	106
11. Tabel 11 Perhitugan Net Method .....	107
12. Tabel 12 Perhitungan Gross Up Method .....	109
13. Tabel 13 Perbandingan Antar Tiga Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	110

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1 Kerangka Pemikiran .....	50
2. Gambar 2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	61
3. Gambar 3 Struktur Organisasi Divisi Akuntansi .....	72



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara pada PT X .....	xvii
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara pada PT X.....	xx
3. Lampiran 3 Surat Riset .....	xxxi
4. Lampiran 4 Dokumentasi.....	xxxii
5. Lampiran 5 Curriculum Vitae .....	xxxiv

**MOTTO**

**“WHEN WE REALIZE HOW LITTLE WE MEAN TO THE UNIVERSE,  
WE REALIZE HOW IMPORTANT WE ARE TO EACH OTHER”**

**-TOM DELONGE-**

## **TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada  
Jasa Perbankan (Studi Pada PT X)

Disusun oleh : Brian Yudhistira

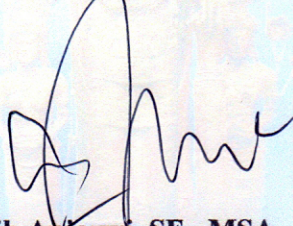
NIM : 135030407111029

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Perpajakan

Malang, 21 November 2017

Komisi Pembimbing  
Ketua



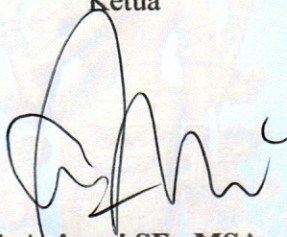
**Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., AK., CA**  
**NIK. 2013048703162001**

## **TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan didepan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Adminitrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 08 Januari 2018  
Jam : 11.00  
Skripsi Atas Nama : Brian Yudhistira  
Judul : Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada  
Perusahaan Jasa Perbankan (Studi Kasus Pada PT X).

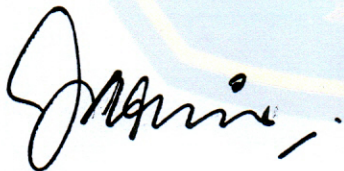
Majelis Penguji,  
Ketua



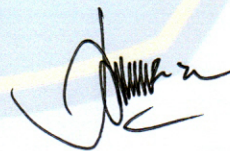
**Astri Warih Anjarwi SE., MSA., AK., CA**  
**NIK. 2013048703162001**

Anggota,

Anggota,



**Kadarisman Hidayat Dr., M.Si**  
**NIK. 19600515 198601 1 002**



**Mirza Maulinarhadi SE., MSA., AK**  
**NIK. 2012018412112001**

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 30 November 2017

Nama : Brian Yudhistira

NIM : 135030407111029

## RINGKASAN

Brian Yudhistira, 2017, **Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Perusahaan Jasa Perbankan** (Studi Kasus Pada PT X) Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak., CA

Atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran pajak perusahaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memberikan solusi terkait perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Karena apabila PT X memberikan tunjangan pajak kepada karyawan seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, maka dengan cara ini, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya di tanggung oleh PT X akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan (tunjangan pajak ikut dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh terlebih dahulu dan dihitung pula Pajak Penghasilan Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi pada situs penelitian. Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu data primer diperoleh melalui wawancara PT X serta data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, dan arsip-arsip yang mempunyai kaitan dengan penelitian. Kemudian analisis data dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil dari penelitian ditemukan bahwa dasar pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya yang pertama adalah PT X memilih untuk menanggung seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para karyawan PT X lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar. Perencanaan pajak yang efektif untuk PT X dimana setiap tahunnya PT X rutin memproses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 secara tepat waktu, serta efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X lebih fokus kepada memanfaatkan aturan-aturan yang berlaku di dalam perpajakan seperti definisi dalam PPh Pasal 21 yang ditinjau dengan melihat sisi PTKP terhadap masing-masing karyawannya.

## SUMMARY

Brian Yudhistira, 2017, **Tax Planning for Income Tax Article 21 in Company Banking Service** (Case Study at PT. X) Astri Warih Anjarwi, SE., MSA., Ak., CA

Based on the importance of tax planning to fulfill tax obligation of taxpayer and related to firm's tax savings, author was interested to study and give solution related with tax planning of PT. X through the calculation of Income Tax Article 21 of its employees. If PT. X give tax benefit toward its employees, such as transport benefit, lunch benefit, position benefit and other benefits, therefore Income Tax Article 21 that actually paid by PT. X would be put first into payroll and benefits element for employees during calculation of Income Tax Article 21 (Income Tax Article 21 was also calculated for tax benefits). It is as if employees receive Income Tax benefit first and its Income Tax Article 21 was also being calculated, and then discounted again by the firm.

This study used descriptive study with qualitative approach. Data was obtained through observation, interview and documentation at study site. Source and type of data used in this study were primary data from interview in PT. X and secondary data from documents, notes, reports and archives related with the study. Data analysis in the study used qualitative approach directly after entering the field, and after completing it in certain intervals. This study used analysis technique suggested by Miles and Huberman (1984) in Sugiyono (2009), that activity in qualitative data analysis was done interactively and continuously until completion, thus obtain saturated data.

Result of this study found out that basic consideration of PT. X in paying Income Tax Article 21 of its employees were firstly, PT. X chose to pay all tax load of its employees, with the expectation that their employees would be more focus in their work and achieve the target to obtain net payroll without thinking about their tax load. Effective tax planning for PT. X whereas annually PT. X processing its Income Tax Article 21 on time, and efficiency of tax planning in PT. X was focused more on utilizing rules in taxation such as definition in Income Tax Article 21 reviewed by looking at PTKP element for each of its employees.



## LAMPIRAN 4

### DOKUMENTASI

Bapak Mahfud Kepala Divisi Perpajakan



Bapak Farid Staff Divisi Perpajakan





Bapak Dito Staff Divisi Perpajakan



**ATAS LIMPAHAN BERKAT RAMHAT ALLAH SWT  
KUPERSEMBAHKAN KARYAKU INI  
KEPADA KEDUA ORANG TUA TERCINTA,  
ADIKKU TERSAYANG,  
SERTA SAHABAT-SAHABATKU**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena telah melimpahkan rahamt dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Jasa Perbankan (Studi pada PT X)”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
2. Bapak M. AL Musadieq, Dr, MBA selaku ketua jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, MS selaku ketua program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya;
4. Ibu Astri Warih Anjarwi, SE, MSA.,Ak.,CA, selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa memberi arahan, bimbingan, motivasi, mengarahkan dan kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;

5. Keluarga tercinta Penulis, Bapak Sulam Andjar Rochim, Ibu Tiara Pengayom dan Adik Patria Azzahra Maharani yang senantiasa memberikan kasih sayang serta do'a yang tak ternilai, motivasi dan dorongan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi perpajakan ini;
6. Teman-teman seperjuangan sebimbangan dari dosen pembimbing penulis terima kasih arahan, referensi, bimbingan, motivasi dari kalian semua terima kasih kepada ; Helwinda, Kukuh, Bayu, Deni, Rossi, Edo, Ines, Pras, Nurhadi, Devita, Viby, dan Laily. Terima kasih banyak untuk kalian sampai ketemu di puncak;
7. Teman-teman penulis selama berada dikampus ini, seluruh teman perpajakan angkatan 2013 yang berjuang bersama penulis, dan memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Teman-teman BPN : Ance, Demas, Mawan, Rindang, Tegar dan Yure;
9. Teman-teman Djoyo Squad : Dio, Yudha, Kilim, Evan, Roi dan Audrey;
10. Teman-teman Sok Yes : Hellenia Merrytha, Elok, Risma, Alief, Hana, Afri, Raka, Iwan, Ganefis, Agung. Terima kasih banyak untuk kalian semua;

Kesempurnaan hanyalah milik ALLAH SWT. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis

harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 30 November 2017

Penulis

## CURICULUM VITAE



Nama : Brian Yudhistira  
NIM : 135030407111029  
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 28 Juni 1995  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Sulfat Bumi Meranti Wangi L-10, Malang  
No HP : 083848324088  
E-mail : [brianyudhistira87@gmail.com](mailto:brianyudhistira87@gmail.com)  
Status : Belum Menikah  
Hobi : Futsal dan Bermain Gitar

### Pendidikan Formal

Pendidikan	Tahun
TK Sabilillah Malang	1998-2001
SD Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman Malang	2001-2007
SMP Negeri 21 Malang	2007-2010
SMA Negeri 2 Malang	2010-2013
Universitas Brawijaya Malang	2013-2017

## DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
RINGKASAN .....	v
SUMMARY .....	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kontribusi Penelitian .....	5
E. Sistematika Pembahasan .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris .....	8
1. Penelitian Terdahulu .....	8
2. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang .....	10
B. Kajian Teoritis .....	12
1. Perencanaan Pajak .....	12
a. Pengertian Perencanaan Pajak .....	12
b. Tahapan Perencanaan Pajak .....	14
c. Fungsi Perencanaan Pajak .....	17
d. Aspek Formal, Aspek Administratif, dan Aspek Material Perencanaan Pajak.....	18
e. Strategi Perencanaan Pajak .....	21
f. Tingkatan Strategi Perencanaan Pajak .....	22
g. Langkah-langkah Dalam Perencanaan Pajak .....	23
2. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	26
b. Pengertian Pegawai Tetap dan Tidak Tetap.....	27
c. Pemotong Pajak.....	27
d. Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	29
e. Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja.....	30

f.	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Yang Menerima Tunjangan Pajak .....	31
g.	Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Sendiri Oleh Karyawan .....	33
h.	Tarif Pajak dan Penerapannya.....	34
i.	Tarif PTKP dan Tarif Pasal 17 UU PPh.....	37
3.	Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan .....	38
a.	Biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.....	38
b.	Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto .....	40
c.	Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	41
4.	Perbankan .....	43
a.	Pengertian Perbankan .....	43
b.	Fungsi Bank .....	43
c.	Jenis-Jenis Bank .....	45
d.	Risiko-risiko Dalam Usaha Perbankan .....	47
5.	Kerangka Pemikiran .....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	53
B.	Fokus Penelitian .....	54
C.	Lokasi dan Situs Penelitian .....	54
D.	Sumber Data .....	55
E.	Instrumen Penelitian .....	56
F.	Teknik Pengumpulan Data .....	57
G.	Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif (Keabsahan Data).....	59
H.	Metode Analisis Data .....	60

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
1.	Gambaran Umum Kota Surabaya .....	64
a.	Geografis Kota Surabaya .....	64
b.	Visi dan Misi Kota Surabaya .....	66
2.	Gambaran Umum PT X .....	67
a.	Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha PT X .....	67
b.	Budaya Perusahaan .....	71
c.	Struktur Organisasi Divisi Akuntansi dan Perpajakan di PT X .....	72
B.	Penyajian Data .....	72
1.	Dasar pertimbangan PT X Dalam Menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	72
1.1	Kebijakan PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawannya .....	72
1.2	Metode Yang Digunakan Oleh PT X Terhadap PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan .....	75
2.	Perencanaan Pajak Yang Efektif Untuk PT X.....	76



2.1 Alur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT X .....	76
2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 di PT X .....	78
2.3 Perencanaan Pajak PPh 21 Yang Dilakukan Oleh PT X .....	82
2.4 Efisiensi Perencanaan Pajak Yang Dilakukan Oleh PT X .....	83
3. Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT X .....	84
4. Rincian Laporan Laba Rugi PT X (Sebelum dan Sesudah Dilakukan Koreksi Fiskal).....	88
C. Analisis Data .....	93
1. Dasar pertimbangan PT X Dalam Menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	93
1.1 Kebijakan PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawannya .....	93
1.2 Metode Yang Digunakan Oleh PT X Terhadap PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan .....	94
2. Perencanaan Pajak Yang Efektif Untuk PT X.....	95
2.1 Alur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT X .....	95
2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 di PT X .....	96
2.3 Perencanaan Pajak PPh 21 Yang Dilakukan Oleh PT X .....	98
2.4 Efisiensi Perencanaan Pajak Yang Dilakukan Oleh PT X .....	99
3. Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT X .....	100
4. Perbandingan Tiga Metode Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan di PT X .....	102
5. Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Karyawan PT X .....	105
a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Gross Method</i> .....	106
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Net Method</i> .....	107
c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan <i>Gross Up Method</i> .....	108
d. Perbandingan Perhitungan Tiga Metode Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	110

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu .....	8
2. Tabel 2 Contoh Perhitungan Net Method .....	31
3. Tabel 3 Contoh Perhitungan Gross Up Method .....	32
4. Tabel 4 Contoh Perhitungan Gross Method .....	33
5. Tabel 5 Tarif PTKP .....	37
6. Tabel 6 Tarif Pemotongan Pajak .....	37
7. Tabel 7 Perhitungan Net Method Yang Dilakukan Oleh PT X .....	81
8. Tabel 8 Laporan Laba Rugi Sebelum Koreksi .....	37
9. Tabel 9 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menggunakan Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 (Dalam Rupiah).....	102
10. Tabel 10 Perhitungan Gross Method .....	106
11. Tabel 11 Perhitugan Net Method .....	107
12. Tabel 12 Perhitungan Gross Up Method .....	109
13. Tabel 13 Perbandingan Antar Tiga Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan .....	110

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1 Kerangka Pemikiran .....	50
2. Gambar 2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif .....	61
3. Gambar 3 Struktur Organisasi Divisi Akuntansi .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara pada PT X .....	xvii
2. Lampiran 2 Transkrip Wawancara pada PT X.....	xx
3. Lampiran 3 Surat Riset .....	xxxi
4. Lampiran 4 Dokumentasi.....	xxxii
5. Lampiran 5 Curriculum Vitae .....	xxxiv

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun, perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak adalah sara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Sophar Lumbantoruan, 1996) dalam Suandy (2016). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak, pelaksanaan kewajiban perpajakan, dan pengendalian pajak.

Salah satu manajemen pajak yang bisa dilakukan perusahaan adalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21. Perusahaan mempunyai wewenang untuk menentukan satu dari tiga metode pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Pertama menanggung beban Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya maka karyawan akan menerima gaji bersih, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang di tanggung, di sisi lain bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan tidak perlu dimasukkan ke dalam tunjangan atau penghasilan karyawan pada saat menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21, akan

tetapi sebagai konsekuensinya, perusahaan atau pemberi kerja tidak boleh membiayakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tersebut. Karena Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung adalah salah satu biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan atau pemberi kerja. Kedua, memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan, dengan begitu selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak yang ditanggung oleh karyawan akan dipotong dari penghasilan per-bulan, apabila selisih pajak terutang dengan tunjangan pajak tersebut ditanggung oleh perusahaan maka jumlah tersebut bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) pemberi kerja. Ketiga, karyawan membayar sendiri Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangnya, maka karyawan akan menerima gaji bersih apabila telah membayarkan pajak terutangnya. Namun, legalitas manajemen pajak tergantung dari metode yang dipakai dengan tujuan memenuhi kewajiban perpajakan yang benar, tetapi jumlah pajak yang akan dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

Berdasarkan penjelasan diatas, sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, PT X juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, sehingga diperlukan perencanaan yang baik dalam rangka penghematan pengeluaran perusahaan. PT X melakukan perencanaan pajaknya dengan cara menetapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang atas gaji karyawan ditanggung oleh PT X dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dibayar (ditanggung) oleh PT X itu tidak dimasukkan sebagai unsur

penghasilan karyawan. Sebagai konsekuensinya, PT X juga tidak boleh membiayakan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung tadi dalam SPT Tahunan PPh Badannya. Sebab biaya-biaya yang berupa imbalan atau penggantian dalam bentuk kenikmatan tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja saat menghitung penghasilan kena pajak.

Atas dasar pentingnya perencanaan pajak bagi pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan terkait pula dengan penghematan pengeluaran pajak perusahaan, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan memberikan solusi terkait perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X melalui perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. Karena apabila PT X memberikan tunjangan pajak kepada karyawan seperti layaknya memberikan tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya, maka dengan cara ini, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sebenarnya di tanggung oleh PT X akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam unsur gaji dan tunjangan kepada karyawan saat penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan (tunjangan pajak ikut dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21-nya). Jadi seolah-olah karyawan menerima uang Tunjangan PPh terlebih dahulu dan dihitung pula Pajak Penghasilan Pasal 21-nya, baru kemudian dipotong kembali oleh perusahaan.

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai metode perencanaan pajak yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan

berbagai metode perencanaan pajak harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Terkadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan perundang-undangan.

Tindakan perubahan harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya kecil. Sepanjang penghematan pajak masih besar, rencana tersebut harus tetap dijalankan karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian yang minimal. Jadi, akan sangat membantu jika pembuatan suatu rencana disertai dengan gambaran atau perkiraan berapa peluang kesuksesan dan berapa laba potensial yang akan diperoleh jika berhasil maupun kerugian potensial jika terjadi kegagalan (Suandy, 2016).

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan masukan bagi perusahaan sehingga kedepannya PT X dapat menghemat beban Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang harus dibayarkan kepada Negara. Maka berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Jasa Perbankan (Studi pada PT X)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, dapat disimpulkan rumusan-rumusan masalah yang perlu di teliti dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan ?



2. Bagaimana perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang efektif untuk PT X ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan.
2. Menganalisis perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang efektif untuk PT X.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis
  - a. Sebagai informasi tambahan dalam kajian manajemen keuangan, khususnya dalam pengambilan keputusan atas perencanaan pajak.
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang penggunaan metode-metode dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 sehingga dapat meminimalkan beban Pajak Penghasilan Badan.
  - c. Menambah wawasan penulis dengan mengaplikasikan teori-teori yang didapat di perkuliahan.
  - d. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang sejenis.

## 2. Kontribusi Praktis

- a. Hasil akhir perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan perusahaan dalam menentukan strategi usaha di waktu yang akan datang.
- b. Peneliti berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima oleh pihak instansi sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja karyawannya.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dengan maksud agar penulisan skripsi ini mempunyai urutan sistematis sehingga diperoleh gambaran umum skripsi. Pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bab yang di dalamnya mencakup sub-sub bab. Rincian atas masing-masing bab adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, kontribusi yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini dan sistematika pembahasan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA, KAJIAN EMPIRIS, KAJIAN TORITIS**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan litelatur yang berhubungan serta menjadi acuan bagi penulis dalam membahas materi penelitian.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penulisan judul skripsi ini, yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang memuat penyajian data dan analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan hasil penelitian tersebut akan menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada BAB I.

### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang diharapkan dapat berguna bagi PT X.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Empiris

##### a) Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan perencanaan pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 21. Peneliti mengambil beberapa referensi penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Tema penelitian kali ini adalah perencanaan pajak untuk mengemat baban Pajak Penghasilan Pasal 21. Adanya persamaan tema menjadi landasan peneliti dalam membahas objek penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema peneliti, anantara lain :

**Tabel 1 Penelitan Terdahulu**

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Objek Penelitian
1	Debora Novayanti (2012)	Analisis Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A)	1) Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang dilakukan sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terhutangnya. 2) Untuk mengetahui apakah penerapan perencanaan pajak yang	Objek penelitian ini adalah peranan perencanaan pajak pada PT A

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Objek Penelitian
			<p>dilakukan sudah tepat sehingga bisa meminimalkan pajak terutangnya.</p> <p>3) Untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan pajak yang dilakukan PT A sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>	
2	Imam Ali Wafa (2013)	Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)	Untuk mengetahui penerapan metode <i>Gross Up</i> untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PDAM Kabupaten Banyuwangi dan dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode <i>Gross Up</i> untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dibandingkan dengan metode <i>Net Method</i> yang saat ini digunakan perusahaan.	Objek penelitian ini adalah PDAM Kabupaten Banyuwangi
3	Amarus Sholihin	Penerapan Perencanaan	Mengetahui perencanaan pajak	Objek Penelitian ini

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Objek Penelitian
	(2013)	Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT Garam Persero (Tbk.) Surabaya	atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada karyawan yang dilakukan oleh PT Garam Persero (Tbk.) dan seberapa besar penghematan beban pajak yang dihasilkan.	adalah PT Garam Persero (Tbk.) Surabaya

Sumber: Data Olahan Penulis 2017

Debora Novayanti (2012) melakukan penelitian dengan judul Analisis Perencanaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Untuk mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT A ). Hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan pajak sangat berperan dalam pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Debora Novayanti dan peneliti adalah sebagai berikut; untuk persamaan, peneliti dengan Debora Novayanti memiliki kemiripan tema penelitian selain itu kesamaan juga terdapat pada tujuan penelitian yakni untuk meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan juga menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh Debora Novayanti dan peneliti.

Imam Ali Wafa (2013) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi). Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu apabila perusahaan menggunakan metode *Gross Up*, perusahaan akan dapat membayar Pajak Penghasilan badan lebih kecil daripada menggunakan *Net Method* untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya yang juga mengakibatkan laba bersih perusahaan menjadi lebih besar. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Imam Ali Wafa dan peneliti adalah sebagai berikut; untuk persamaan, peneliti dengan Imam Ali Wafa memiliki kemiripan tema penelitian selain itu kesamaan juga terdapat pada tujuan penelitian yakni untuk meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan juga menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah lokasi dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh Imam Ali Wafa dan peneliti.

Amarus Sholihin (2013) melakukan penelitian dengan judul Penerapan Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT Garam Persero (Tbk.) Surabaya. Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu PT Garam Persero (Tbk.) telah melakukan perencanaan pajak yaitu perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan dengan *Gross Up Method* yang memberikan tunjangan pada karyawan. Perusahaan yang memberlakukan *Gross Up Method* berhasil

menghemat pengeluaran PPh Badan. Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan Amarus Sholihin dan peneliti adalah sebagai berikut; untuk persamaan, peneliti dengan Amarus Sholihin memiliki kemiripan tema penelitian selain itu kesamaan juga terdapat pada tujuan penelitian yakni untuk meneliti alternatif perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang digunakan perusahaan agar dapat menghemat beban Pajak Penghasilan perusahaan. Jenis penelitian yang dilakukan juga menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan untuk perbedaannya adalah lokasi dalam melakukan penelitian yang dilakukan oleh Imam Ali Wafa dan peneliti.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1) Perencanaan Pajak**

#### **a) Pengertian Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan dan pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Menurut Sumarsan (2015), perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Manajemen diartikan sebagai seni dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran kinerja. Fungsi dari manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian,



pelaksanaan dan pengawasan atau pengendalian. Perencanaan merupakan suatu proses yang dimulai dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut secara menyeluruh dan alat untuk memberikan umpan balik terhadap hasil yang di capai dengan perencanaan semula.

Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan penghindaran pajak karena secara hakikat ekonomis, keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak adalah rekayasa yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang dan berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang. Ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan celah dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga rahasia sebaik mungkin.

Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Apabila fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Wajib Pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan secara seksama.

#### **b) Tahapan Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2016), dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun

internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan dengan tahap-tahap berikut ini :

1. Menganalisis informasi yang ada.

Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

2. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan-tindakan berikut ini :

- a) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.

Hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dilihat dari sudut pandang perpajakan, proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan.

- b) Pemilihan negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Rencana perpajakan internasional mungkin dapat diperoleh perlakuan khusus dengan memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-

negara yang berbeda. Harus diperhatikan dalam menguji keunggulannya tidak hanya menguji pertimbangan bisnis, tetapi juga menguji keunggulan pengenaan pajaknya.

- c) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dapat dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi, maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam basis data.

### 3. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak.

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut akan dihitung se-akurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut :

- a. Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan;
- b. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik;
- c. Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.

Hasil dari suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan/perundang-undangan.

5. Memutakhirkan rencana pajak.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Namun, informasi mengenai perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas bisnis sering kali terbatas. Oleh karena itu, ketika memberikan informasi kepada pihak luar negeri sehubungan dengan rencana perubahan-perubahan yang akan segera terjadi dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya, juga harus ditanyakan mengenai dampaknya terhadap perjanjian yang di buat.

### **c) Fungsi Perencanaan Pajak**

Fungsi dari perencanaan pajak menurut Sumarsan (2015) adalah sebagai berikut :

#### 1. Arah tujuan perusahaan

Perusahaan dengan jelas menentukan bahwa perusahaan harus menaati semua peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia.

#### 2. Mengurangi ketidakpastian

Kesalahan dalam penerapan peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka perusahaan harus melakukan pembetulan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) pajak perusahaan, dan jika terjadi kekurangan bayar maka perusahaan harus membayar kekurangan bayar tersebut dan sanksi keterlambatan kekurangan pembayaran pajak tambahan tersebut.

#### 3. Meningkatkan efisiensi sumber daya

Sebuah perusahaan menjalankan kegiatan usahanya secara transparan maka perusahaan akan menggunakan sumber dayanya secara efisien.

#### 4. Menetapkan standar pengendalian perusahaan

Perusahaan menggunakan konsultan pajak yang bersertifikasi dan memiliki pengalaman untuk melakukan *review* atas pelaporan pajak sebelum dilaporkan ke kantor pajak.

### **d) Aspek Formal, Aspek Administratif, dan Aspek Material Perencanaan Pajak**

Menurut Suandy (2011), aspek formal kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-Undang perpajakan. Oleh karena itu,

ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang dapat dikenakan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik, diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan. Selanjutnya selaras dengan pengelompokan hukum pajak aspek formal administratif perlu untuk dimengerti dan dipahami untuk dapat menghindari sanksi administrasi maupun pidana.

Pungutan pajak melalui Direktorat Jendral Pajak berdasarkan pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sebagai hukum positif semua Undang-Undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan Direktorat Jendral Pajak. Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran, Dirjen Pajak mengeluarkan Surat Edaran.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh Wajib Pajak. Sistem perpajakan selalu dipisahkan antara *assessment* dengan sistem pembayaran (*payment system*). *Assessment* yang berlaku saat ini adalah *self assessment* yaitu kewajiban untuk menghitung sendiri, membayar sendiri, dan melaporkan sendiri. Sistem pembayaran yang berlaku dapat dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment system*) maupun melalui pemotongan oleh pihak ketiga (*withholding system*).

Pembayaran pajak sebagai transfer sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran pajak harus direncanakan secara baik supaya pajak dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Masih ada kewajiban pelaporan pembayaran pajak yang juga harus direncanakan supaya dapat selesai dan dilaporkan tepat pada waktunya.

Aspek material pajak dikenakan terhadap objek pajak yang dapat berupa keadaan, perbuatan, maupun peristiwa. Basis penghitungan pajak adalah objek pajak. Maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih (karena dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak membayar sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana). Objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Pelaporan objek pajak yang benar dan lengkap harus bebas dari berbagai rekayasa negatif.



#### e) Strategi Perencanaan Pajak

Manajer perusahaan perlu mempelajari perencanaan pajak untuk mengoptimalkan pembayaran beban pajak perusahaan yang merupakan keberhasilan kinerja perusahaan, dan para manajer adalah pengambil keputusan utama di dalam perusahaan. Manajer yang memahami perpajakan akan membuat keputusan yang lebih baik dan lebih efektif untuk perusahaan. Manajer yang dapat mengidentifikasi masalah perpajakan akan lebih efektif dalam melakukan seleksi konsultan pajak untuk membantu kasus perpajakan perusahaan. Manajer harus memahami kegiatan operasional perusahaan, karena keberhasilan kinerja sebuah perusahaan diukur dengan laba bersih dan arus kas bersih. Ketika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban pajak secara benar maka beban pajak akan membebani arus kas perusahaan dan laba bersih perusahaan juga.

Strategi perencanaan pajak yang paling mudah adalah mempelajari, memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sampai dengan hal-hal yang sangat sederhana. Seperti melakukan pembayaran jumlah pajak yang kurang dibayar dengan tepat waktu, melaporkan jenis SPT (Surat Pemberitahuan) Pajak, baik masa maupun tahunan dengan tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi ataupun dianggap sebagai Wajib Pajak “*bandel*” karena tidak melakukan kewajiban pajak dengan tepat waktu. Contoh yang sangat sederhana sekali tetapi dapat merugikan perusahaan adalah perusahaan

yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat faktur pajak atas penyerahan barang yang pajak pertambahan nilainya dibebaskan, dikenai sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Hal ini akan sangat memberatkan perusahaan akibat kelalaian membuat Faktur Pajak dengan menganggap bahwa penyerahan barang yang dilakukan perusahaan merupakan barang yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai tidak ada efek antara dibuka atau tidak dibuka faktur pajak, karena jumlah pajak pertambahan nilai yang akan dibayar adalah nol (Sumarsan, 2015).

#### **f) Tingkatan Strategi Perencanaan Pajak**

Menurut Sumarsan (2015), strategi terdapat pada berbagai tingkatan dalam sebuah organisasi. Tingkatan strategi dapat dibagi atas 3 bagian, yaitu :

##### **a. Strategi Korporat**

Strategi korporat akan menentukan apakah bentuk kegiatan bisnis dari organisasi tersebut, perlukah satu perusahaan diintegrasikan dengan perusahaan lain atau harus berdiri sendiri-sendiri dan bagaimana bisnis tersebut berhubungan dengan masyarakat.

##### **b. Strategi Bisnis**

Isu utama strategi pada level ini adalah berkenaan dengan persaingan di suatu pasar oleh setiap unit bisnis, misalnya apa saja keuntungan terhadap pesaing, apa peluang yang dapat dimanfaatkan,

bagaimana perusahaan harus mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai posisi kompetitif yang diinginkan.

c. Strategi Operasional / Fungsional

Suatu pernyataan rinci tujuan jangka pendek dan metode yang akan digunakan oleh suatu bidang operasional untuk mencapai tujuan jangka pendek unit bisnisnya. Isu utama pada strategi pada level ini berkenaan dengan bagaimana masing-masing bagian dari organisasi dapat dirangkai secara bersama-sama membentuk perencanaan strategi yang secara efektif mampu menghasilkan arah strategi tersebut.

**g) Langkah-langkah dalam Perencanaan Pajak**

Menurut Sumarsan (2015), dalam rangka melakukan perencanaan pajak, maka Wajib Pajak harus memperhatikan langkah-langkah berikut untuk menyusun perencanaan pajak bagi perusahaannya :

1. Memahami dan menerapkan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Jenis-jenis-jenis peraturan perpajakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, Peraturan Dirjen Pajak dan Surat Edaran Dirjen Pajak. Setelah mengetahui peraturan dan perundang-undangan perpajakan maka Wajib Pajak harus mengoptimalkan penerapan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

2. Menentukan hasil (*outcome*) dari melakukan perencanaan pajak, seperti berikut :
  - a. Wajib Pajak melakukan efisiensi pembayaran pajak yang masih dalam ruang lingkup peraturan dan perundang-undangan perpajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.
  - b. Wajib Pajak dalam membayar gaji karyawan atau penggunaan jasa tenaga ahli (dokter, konsultan atau pengacara), maka harus melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21.
3. Melakukan analisis terhadap kondisi sekarang dan peluang yang akan datang, yang terdiri dari berikut :
  - a. Adanya komitmen dari pimpinan puncak perusahaan dengan sepenuh hati melaksanakan kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
  - b. Mendidik dan melatih karyawan secara berkesinambungan khususnya di bagian administrasi perpajakan supaya dapat bekerja secara produktif, dengan harapan tidak terjadi kesalahan dalam menerapkan peraturan perpajakan.
4. Menyusun laporan keuangan yang dilengkapi dengan buku besar, laporan pendukung, laporan keuangan ataupun rekonsiliasi yang memperjelas transaksi keuangan perusahaan. Penyusunan laporan

keuangan ini adalah laporan keuangan *fiscal* yang telah dilakukan koreksi dari laporan keuangan komersial.

5. Melakukan transformasi terhadap penghasilan, misalnya melakukan transformasi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bertarif tinggi menjadi penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bertarif rendah.
6. Penyimpanan arsip-arsip kegiatan operasional secara rapi dan lengkap. Arsip yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) harus tersimpan dan dapat dipinjamkan kepada petugas pajak jika dilakukan pemeriksaan. Ketika bukti tidak mendukung dalam pemeriksaan pajak maka pemeriksa akan melakukan koreksi sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih tinggi. Sebagai contoh : dokumen pendukung untuk karyawan sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah surat lamaran kerja, surat keputusan pengangkatan karyawan, absensi, kartu keluarga karyawan yang bersangkutan untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
7. Pembayaran pajak yang terutang dengan tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi keterlambatan dari kantor pajak.
8. Penyampaian Surat Pemberitahuan ke Kantor Pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
9. Menghindari terjadi pemeriksaan pajak dengan cara menghindari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar.

10. Jika terjadi pemeriksaan pajak, maka perencana pajak mewakili perusahaan untuk dapat menerima Pemeriksa Pajak kapan saja dengan hati yang lega.

Seseorang akan memiliki keahlian dalam merencanakan pajak perusahaan jika dia secara berkesinambungan mendalami dan mempelajari masalah-masalah perpajakan yang ada serta secara terus-menerus dia melakukan berbagai penelitian, karena perencanaan pajak ini merupakan suatu hasil penelitian yang dirancang untuk suatu transaksi yang akan terjadi. Karena perencanaan pajak yang digunakan oleh perusahaan adalah pandangan ke depan perusahaan terhadap kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus sebelum terjadinya suatu transaksi.

## **2) Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a) Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan sehubungan dengan penjelasan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun (Lubis dan Sari, 2014).

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan PPh yang wajib dilakukan oleh pemberi penghasilan (pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan) kepada jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan (Priantara, 2012).

### **b) Pengertian Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap**

Menurut Mardiasmo (2016), pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Sedangkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

### **c) Pemotong Pajak**

Pemotong Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh karyawan atau bukan karyawan;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik

Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua;
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, perusahaan badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan, jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk namanya sendiri, bukan untuk nama persekutuannya;
5. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri;
6. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan;
7. Penyelenggara kegiatan (termasuk pemerintah, organisasi termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga



lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah orang pribadi dan orang-orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

#### **d) Pelunasan dan Pelaporan Pajak Penghasilan**

Menurut Muljono (2010) pada prinsipnya, pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun buku, tergantung tahun yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenaan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong hak lain, atau di bayar sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun, besarnya PPh yang masih urang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dilaporkan.

Adapun pelunasan PPh dilakukan dengan cara membayar PPh yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) pada

bank persepsi atau dengan cara lainnya, seperti lewat ATM atau berbagai cara *online system* serta *offline system* lainnya. Pembayaran pajak telah ditentukan batas waktunya. Apabila batas waktu pelunasan pajak jatuh pada hari libur, maka batas waktu tersebut diundur pada hari berikutnya, yang bukan merupakan hari libur. Pelunasan PPh dapat dilakukan oleh wajib pajak dengan berbagai cara, seperti :

- a. Dilunasi oleh pemungut
- b. Dilunasi oleh pemotong
- c. Dilunasi oleh wajib pajak
- d. Dilunasi lewat petugas pajak

**e) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Oleh Pemberi Kerja**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan dan bukan merupakan pengurang penghasilan karyawan yang bersangkutan.

Berikut contoh dari Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja :

Rizal Budiman adalah seorang karyawan dari PT Sinar Mentari dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp. 20.000.000,- sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp. 500.000,-.

**Tabel 2 Contoh Perhitungan *Net Method***

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	
Gaji Setahun	12 x 20,000,000	240,000,000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	6,000,000	
Iuran Pensiun	500,000	6,500,000
		233,500,000
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak	54,000,000	
Tanggungan Istri	4,500,000	
Tanggungan Anak (3)	13,500,000	72,000,000
		161,500,000
PKP		
5% x 50,000,000	2,500,000	
15% x 111,500,000	16,725,000	
	19,225,000	
PKP Sebulan	19,225,000 : 12	1,602,083.33

Pajak Penghasilan Pasal 21 per-bulan sebesar Rp 1.602.083,33 ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan sebagai pemberi kerja dan jumlah tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan bukan penghasilan kena pajak bagi karyawan.

**f) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Karyawan Tetap Yang Menerima Tunjangan Pajak**

Karyawan diberikan tunjangan pajak oleh pemberi kerja, maka tunjangan pajak tersebut merupakan penghasilan karyawan yang bersangkutan dan ditambahkan pada penghasilan yang diterimanya.

Berikut contoh Pajak Penghasilan yang diberikan tunjangan pajak oleh pemberi kerja :

Rizal Budiman adalah seorang karyawan dari PT Sinar Mentari dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp. 20.000.000,- sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp. 500.000,-

**Tabel 3 Contoh Perhitungan *Gross Up Method***

<b>Keterangan</b>	<b>Nominal</b>	
Gaji	12 x 20,000,000	240,000,000
Tunjangan Pajak		22,617,647
		262,617,647
Pengurang :		
Biaya Jabatan	6,000,000	
Iuran Pensiun	500,000	6,500,000
		256,117,647
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak	54,000,000	
Tanggungan Istri	4,500,000	
Tanggungan Anak (3)	13,500,000	72,000,000
		184,117,647
PKP		
5% x 50,000,000	2,500,000	
15% x 134,117,647	20,117,647	
	22,617,647	

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang harus dibayarkan oleh karyawan sesuai dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sebesar Rp 22.617.647, dengan metode ini karyawan akan menerima gaji bersih tanpa dikurangi dari gajinya dan perusahaan dapat menghemat beban pajak karena pada saat perhitungan, laba perusahaan akan terlihat kecil akan tetapi tunjangan pajak yang di berikan kepada karyawan, akan di kembalikan oleh karyawan tersebut.

**g) Perhitungan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Yang Ditanggung Sendiri Oleh Karyawan**

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang ditanggung sendiri oleh karyawan bukan lagi termasuk dalam pengertian kenikmatan, karena gaji yang diterima oleh karyawan akan mengalami pengurangan penghasilan yang bersangkutan sebagai konsekuensi beban pembayaran pajak terutang.

Berikut contoh dari Pajak Penghasilan yang ditanggung sendiri oleh karyawan :

Rizal Budiman adalah seorang karyawan dari PT Sinar Mentari dengan status menikah dan mempunyai 3 orang anak. Dia menerima gaji Rp. 20.000.000,- sebulan dan PPh ditanggung oleh pemberi kerja. Tiap bulan ia membayar iuran pensiun sebesar Rp. 500.000,-.

**Tabel Contoh Perhitungan *Gross Method***

Keterangan	Nominal	
Gaji Setahun	12 x 20,000,000	240,000,000
Pengurang :		
Biaya Jabatan	6,000,000	
Iuran Pensiun	500,000	6,500,000
		233,500,000
PTKP (K/3)		
Wajib Pajak	54,000,000	
Tanggungan Istri	4,500,000	
Tanggungan Anak (3)	13,500,000	72,000,000
		161,500,000
PKP		
5% x 50,000,000	2,500,000	
15% x 111,500,000	16,725,000	
	19,225,000	
PKP Sebulan	19,225,000 : 12	1,602,083.33

Pajak Penghasilan Pasal 21 per-bulan sebesar Rp 1.602.083,33 ditanggung dan dibayarkan sendiri oleh karyawan dan karyawan akan menerima gaji bersih setelah membayarkan pajak terutanganya kepada pemberi kerja.

#### **h) Tarif Pajak dan Penerapannya**

Menurut Mardiasmo (2016), tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh, diterapkan atas **Penghasilan Kena Pajak** dari :

- a. Pegawai tetap;
- b. Penerima pensiun berkala;
- c. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 3.000.000, dan;
- d. Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

Penghasilan Kena Pajak dihitung sebesar :

##### **1. Bagi pegawai tetap**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurang PTKP. Sedangkan

penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan
- b. Iuran-iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 21

= Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan netto - PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan bruto – biaya jabatan – iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

## **2. Bagi penerima pensiun berkala**

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi penerima pensiun berkala adalah sebesar penghasilan netto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

Pajak Penghasilan Pasal 21

= Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan netto - PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

= (Penghasilan bruto – biaya pensiun – PTKP) x tarif Pasal 17  
UU PPh

### 3. Bagi pegawai tidak tetap

Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, yang memenuhi ketentuan :

1. Mempunyai NPWP
2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21, serta
3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya

Pajak Penghasilan Pasal 21 = 50% x (Kumulatif Penghasilan  
Bruto – PTKP) x tarif Pasal 17 UU PPh

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

Pajak Penghasilan Pasal 21 = 50% x Kumulatif Penghasilan  
Bruto x tarif Pasal 17 UU PPh



**i) Tarif PTKP dan Tarif Pasal 17 UU PPh**

Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016 adalah sebagai berikut :

**Tabel 5 Tarif PTKP**

<b>Keterangan</b>	<b>Tarif</b>
Wajib Pajak orang pribadi	Rp 54.000.000
Wajib Pajak yang memiliki istri	Rp 4.500.000
Istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000
Anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam satu garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000

Penerapan tarif pemungutan pajak kepada karyawan tetap dan penerima pensiun berkala sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (Priantara,2012) sebagai berikut :

**Tabel 6 Tarif Pemotongan Pajak**

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>
Di atas Rp 500.000.000	30%

### **3) Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan**

#### **a) Biaya Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto**

Menurut Suandy (2011), biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak, adalah sebagai berikut :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain :
  - a. Biaya pembelian bahan;
  - b. Biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  - c. Bunga, sewa dan royalti;
  - d. Biaya perjalanan;
  - e. Biaya pengolahan limbah;
  - f. Premi asuransi; Biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan peraturan menteri keuangan;
  - g. Biaya administrasi;
  - h. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
5. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
6. Biaya beasiswa, magang dan penelitian.
7. Piutang yang tidak dapat ditagih, dengan syarat sebagai berikut :
  - a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak.
8. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

12. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak.

**b) Biaya Yang Tidak Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto**

Menurut Suandy (2014), biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak sebagai berikut :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham.
3. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan, kecuali :
  - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit;
  - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang di bentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
  - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan;
  - f. Cadangan biaya penutupan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha limbah industri.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajakorang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai prnghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
6. Pajak Penghasilan.
7. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
8. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
9. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan.

**c) Rekonsiliasi Pajak Penghasilan Pasal 21**

Salah satu aktifitas yang paling penting dalam rangka tutup pembukuan dan persiapan laporan keuangan pada akhir tahun adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi umumnya dilakukan terhadap akun-akun yang bersifat vital, seperti bank, hutang dagang dan hutang pajak. Rekonsiliasi atas hutang pajak pajak 21 dilakukan antara suatu kumpulan rekening yang telah dikelompokkan atau di golongan berdasarkan manfaat, sifat dan tujuan (*general ledger*) dengan SPT bulanan yang telah disetor dan

dilaporkan. Rekonsiliasi dilakukan dengan membandingkan antara Penghasilan Bruto pada SPT bulanan dengan komponen penghasilan karyawan yang ada dalam *general ledger*.

Rekonsiliasi SPT PPh Badan dengan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah prosedur pengecekan yang dilakukan oleh KPP terhadap jumlah biaya gaji dan tunjangan serta biaya lainnya yang dibayarkan kepada pihak perorangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, yang tercantum dalam SPT Pajak Penghasilan Pasal 21. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ini terdiri atas gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan dan penghasilan lain yang diberikan kepada pihak perorangan lainnya yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 21, apakah jumlahnya telah sama antara yang ada dalam SPT PPh Badan dengan SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 (Suandy, 2011).

Komponen yang umum ada dalam penghasilan karyawan antara lain sebagai berikut :

- a) Gaji pokok
- b) Tunjangan lembur
- c) Tunjangan transport
- d) Tunjangan makan
- e) Bonus dan THR
- f) Tunjangan Jamsostek
- g) Premi asuransi kesehatan
- h) Tunjangan pajak (apabila ada)

#### **4) Perbankan**

##### **a) Pengertian Perbankan**

Subagio, dalam Latumaerissa (2013) mendefinisikan “Bank sebagai suatu badan usaha yang kegiatan utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan pihak lainnya, kemudian mengalokasikannya kembali untuk memperoleh keuntungan serta menyediakan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Rudy Tri Sasonto, dalam Latumaerissa (2013) mendefinisikan “Bank sebagai suatu industry yang bergerak pada bidang kepercayaan yang menghubungkan debitur dan kreditur dana”.

##### **b) Fungsi Bank**

Menurut Latumaerissa (2013), fungsi dari bank antara lain :

###### *a) Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh perbankan dilakukan berdasarkan atas kepercayaan, dalam pengertian bahwa kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percasya diri masyarakat atau nasabah terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank, karena tanpa rasa percaya, masyarakat tidak akan menitipkan dananya di bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di setiap bank. Sebaliknya bank dalam kedudukannya sebagai kreditur yaitu pihak yang meminjamkan pinjaman kredit kepada masyarakat, dalam menjalankan aktifitas

kredit, harus merasa yakin dan percaya terhadap calon penerima kredit atau debitur. Kepercayaan tersebut meliputi konsistensi dan kejujuran nasabah untuk menggunakan kredit yang diberikan sesuai dengan permintaan kredit, sehingga tujuan nasabah tercapai dan tujuan bank juga tercapai. Selain itu aspek kepercayaan juga berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjaman yang telah diterimanya, baik cicilan bunga maupun pengembalian pokok pinjaman.

*b) Agent of Development*

Fungsi ini berkaitan dengan tanggungjawab bank dalam menunjang kelancaran transaksi ekonomi yang dilakukan oleh setiap pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi kita ketahui bahwa kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Kegiatan produksi dilakukan untuk menambah nilai guna barang yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan distribusi berkaitan dengan kegiatan menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi dari produsen kepada konsumen dengan kegiatan menyalurkan barang yang telah di produksi dari produsen kepada konsumen dengan menggunakan saluran-saluran distribusi yang tersedia. Kegiatan konsumsi adalah tindakan untuk mengurangi nilai guna dari suatu barang. Semua kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat pembayaran, alat kesatuan hitung, dan alat pertukaran. Karena hal ini, maka bank sebagai lembaga keuangan



berfungsi untuk menjrmbatani semua kepentingan pelaku ekonomi yang dilakukan.

*c) Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, di samping memebricaikan pelayanan jasa keuangan sebagaimana kegiatan yang dilakukan, maka bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan yang lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman, atau inkaso.

**c) Jenis-jenis Bank**

Menurut Latumaerissa (2015), jenis-jenis kantor bank adalah :

a) Kantor Pusat Non-Operasional

Kantor Pusat Non-Operasional (KNPO) adalah bagaian dari kantor pusat suatu bank yang hanya melakukan kegiatan masyarakat.

b) Kantor Pusat Operasional

Kantor Pusat Operasional (KPO) adalah bagian dari kantor psat suatu bank yang melakukan kegiatan operasional perbankan sesuai dengan fungsinya dan menjadi pusat transaksi semua caban bank tersebut.

c) Kantor Cabang

Kantor cabang adalah unit usaha dari suatu bank yang diizinkan untuk menjalankan semua jenis usaha bank dan menyelenggarakan tata usaha atau pembukuan tersendiri.

d) Kantor Cabang Pembantu

Kantor Cabang Pembantu adalah unit usaha dari suatu bank yang hanya membantu kantor pusat atau cabang bank yang bersangkutan dalam proses pengumpulan dana dan tidak diperkenankan untuk memberikan kredit diluar plafon yang sudah ditentukan.

e) Kantor Perwakilan

Kantor Perwakilan adalah unit usaha suatu bank yang berada diluar daerah lain dari pusatnya dan kegiatan utamanya adalah sebagai penghubung antara bank dengan relasi-relasinya.

f) Kantor Perwakilan Bank Asing

Kantor Perwakilan Bank Asing adalah unit dari kantor pusat bank yang ada di luar negeri yang kegiatannya hanya sebagai penghubung antara bank dengan relasi-relasinya.

g) Kantor Kas

Kantor Kas adalah unit yang menetap dari kantor bank yang sudah ada dan melakukan kegiatan kas dalam rangka pemberian pelayanan kepada nasabahnya.

h) Kas Mobil

Kas Mobil adalah kegiatan kas di luar kantor sebagai usaha dari kantor bank sudah ada dalam rangka memberikan pelayanan kepada nasabah dengan menggunakan sarana transportasi darat (mobil).

#### **d) Risiko-risiko Dalam Usaha Perbankan**

Risiko bisnis di bidang industri perbankan adalah banker harus benar-benar menyadari berbagai risiko bisnis yang dihadapinya. Usaha perbankan adalah usaha yang memiliki risiko yang tinggi baik dari aspek penarikan dana maupun dari aspek penyaluran dana. Berbagai risiko usaha yang timbul tentunya banker harus melakukan perencanaan yang tepat dengan kemampuan prediksi yang akurat. Menurut Latumaerissa (2015), risiko-risiko usaha bank tersebut antara lain :

##### **a. Risiko Likuiditas**

Risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek pada masyarakat saat dibutuhkan, yang disebabkan karena bank kekurangan likuiditas (ditariknya simpanan oleh penitip).

##### **b. Risiko Tingkat Bunga**

Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga, sebagai akibat dari penerimaan dan penarikan yang dilakukan bank.

##### **c. Risiko Kredit**

Risiko yang timbul karena debitur tidak dapat mengembalikan dan yang dipinjamkan bunga yang harus dibayar kepada bank. Risiko ini tentu harus diantisipasi oleh bank melalui suatu proses penilaian serta analisis kredit yang benar.

##### **d. Risiko Manajemen**

Risiko yang ditimbulkan oleh internal bank yang bersangkutan, yang disebabkan oleh faktor mentalitas karyawan bank. Risiko ini sangat

penting untuk diperhatikan bagi sebuah bank, karena jika lengah maka terjadinya kerjasama antara nasabah dan karyawan bank untuk membobol bank melalui bentuk-bentuk transaksi fiktif mungkin bias saja terjadi.

e. Risiko Investasi

Risiko yang timbul karena bank mengalami kerugian berupa penurunan nilai surat berharga yang dimiliki seperti saham obligasi. Hal ini sering terjadi di mana bank-bank yang memiliki kelebihan likuiditas sering kali mengalokasikan dana yang diterima dari pihak ketiga untuk kegiatan investasi surat berharga di pasar modal atau pasar uang.

f. Risiko Operasi

Risiko yang dihadapi oleh bank berkaitan dengan masalah penghimpunan dan penggunaan dana, seperti perubahan dalam komposisi biaya operasional dan lain sebagainya.

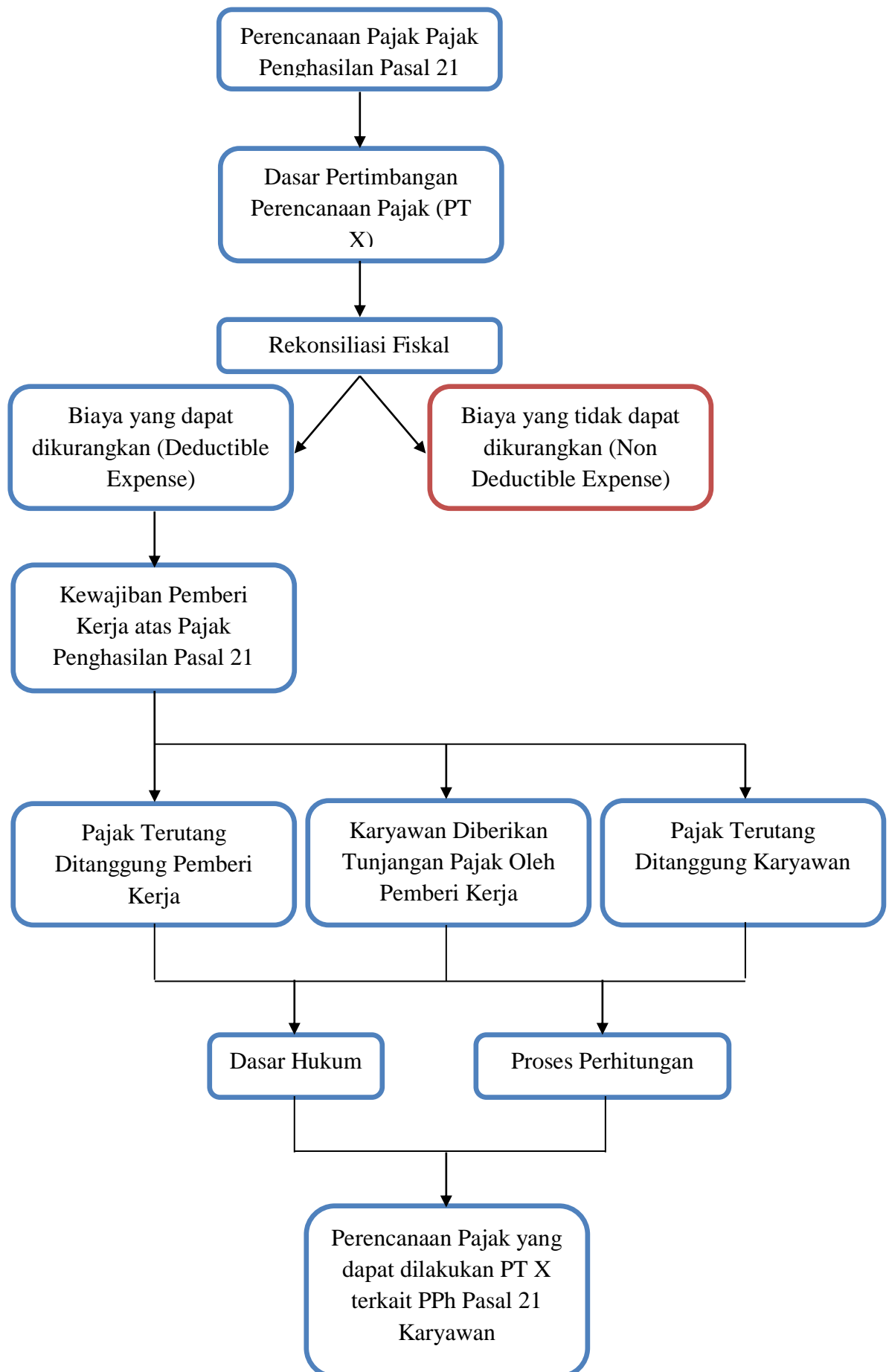
g. Risiko Pendapatan

Risiko yang timbul akibat gagalnya penyaluran kredit bank. Pendapatan bank diperoleh dari pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan selain bunga. Adanya kredit macet, perubahan suku bunga dan turunnya nilai jaminan akan menyebabkan perubahan dalam pendapatan suatu bank.

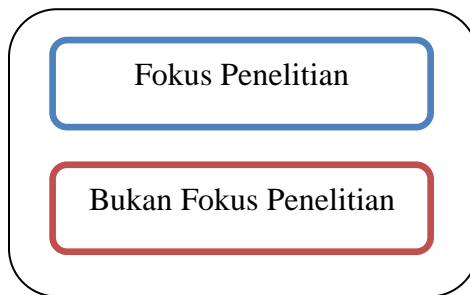
#### h. Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat perubahan tingkat bunga pasar, tingkat kurs valuta asing, tingkat inflasi, dan sebagainya. Likuidasi atau bangkrutnya suatu bank yang besar dapat menyebabkan bangkrutnya bank yang lain, sebagai akibat penarikan dana secara tiba-tiba. Setiap saat bank harus mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar untuk menetapkan suku bunga simpanan dan kredit.

### 5) Kerangka Pemikiran



Keterangan :



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Berawal dari perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu manajemen pajak yang dilakukan PT X untuk meminimalisir beban Pajak Penghasilan, kemudian PT X melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan perencanaannya, untuk mengefektifkan manajemen pajaknya maka dalam perencanaan pajak terdapat kegiatan atau dilakukan rekonsiliasi fiskal. Unsur-unsur yang ada direkonsiliasi fiskal dalam melakukan perencanaan pajak adalah unsur biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expense) dan unsur biaya yang tidak dapat dikurangkan (Non Deductible Expense), dalam penelitian ini lebih di fokuskan kepada biaya yang dapat dikurangkan (Deductible Expense). Deductible Expense adalah biaya yang dapat dikurangkan dalam perencanaan pajak, salah satunya adalah kewajiban pemberi kerja atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Adapun metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat dipilih oleh perusahaan yaitu pajak terutang ditanggung pemberi kerja, pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawan, dan pajak terutang ditanggung sendiri oleh karyawan. Masing-masing metode memiliki dasar hukum dan proses perhitungan yang berbeda. Ketika telah dianalisis dalam perhitungan tersebut maka dapat diketahui metode perhitungan Pajak

Penghasilan Pasal 21 bagi perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh PT X terkait Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan dilakukan dengan cara pencatatan terhadap pengamatan fakta yang dilihat oleh peneliti. Menurut Taylor dan Bogdan, dalam Suyanto dan Sutinah (2007) menjelaskan pengertian kualitatif dapat diartikan sebagai “penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti”. Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan yang melatarbelakangi penelitian kualitatif. Oleh karena itu, sebelum membicarakan mengenai bagaimana metode dan prosedur melakukan suatu penelitian kualitatif perlu untuk terlebih dahulu memahami teori dan pendekatan yang melatarbelakangi metode penelitian kualitatif (Suyanto dan Sutinah, 2007).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Zuriah, 2009).

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan

tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta menguraikan permasalahan mengenai prosedur pertimbangan PT X dalam menetapkan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang efektif untuk PT X.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan arahan untuk melakukan penelitian dan juga penjelasan mengenai batasan-batasan masalah sehingga masalah yang diteliti tidak menjadi luas dan melebar. Penelitian ini berfokus pada :

- a. Dasar pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap.
- b. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang efektif untuk PT X.

## **C. Pemilihan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dituju adalah kota Surabaya.

Situs penelitian merupakan letak penelitian yang sebenarnya dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat, valid dan dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah PT X. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti pada saat melakukan pra-riset bahwa pihak PT X menanggung seluruh beban pajak

karyawannya, dan penelitian ini akan memberikan masukan bagi perusahaan mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Masukan tersebut diharapkan akan membantu perusahaan dalam menghemat beban Pajak Penghasilan Badan.

#### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland (1984) dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Azwar (2013), berdasarkan sumbernya, data dapat diolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif lebih cenderung mengutamakan wawancara dan observasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan sumbernya. Sumber data tersebut berasal dari informan (narasumber) yang berhubungan dengan objek penelitian berupa kata-kata, serta tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang akan diwawancarai yaitu karyawan PT X yang bekerja di divisi akuntansi dan perpajakan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber datanya. Sumber data diperoleh terlebih dahulu dari pihak lain yang berasal dari luar penelitian. Data ini merupakan data pendukung yang mempunyai tujuan untuk memperkuat data primer. Data sekunder didalam penelitian meliputi dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan,

dsan arsip-arsip yang mempunyai kaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan tetap bulan Januari-Desember 2016, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari-Desember, serta perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2010) Instrumen Penelitian merupakan alat untuk memperoleh data dan dipilih sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Instrumen penelitian merupakan salah satu alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang bertujuan agar kegiatan penelitian tersebut menjadi sistematis dan mudah. Instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri,
2. Pedoman Wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang akan diajukan peneliti terhadap informan yang dilakukan secara lisan dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Alat Perekam, adalah alat yang digunakan peneliti guna merekam kegiatan yang dilakukan peneliti dengan narasumber sebagai bukti *real* dalam penelitian
4. Catatan, adalah suatu media yang digunakan peneliti menulis jawaban yang diberikan oleh narasumber.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan atau cara untuk memperoleh atau mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan untuk dilakukan analisis lebih lanjut untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Maksudnya adalah melalui pengamatan atau observasi maka peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi akan dilakukan secara langsung dan mencatat segala sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini pertama-tama peneliti melakukan observasi secara tidak langsung melalui sosial media untuk mengetahui perencanaan pajak yang di terapkan oleh PT X, dan salah satu sosial media yang mendukung adalah website dari PT X. Selanjutnya peneliti melakukan observasi secara langsung di PT X.

### 2. Wawancara

Menurut Moleong (2014) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang

mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu., wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian melalui proses tanya jawab secara lisan. Proses dalam interaksi tersebut akan menghasilkan informasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada di PT X, khususnya mereka yang bekerja pada bagian Keuangan dan Perpajakan. Pertanyaan yang diajukan adalah tentang apa saja mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X serta perencanaan pajak yang efektif untuk PT X. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara harus sesuai dengan fokus penelitian agar mendapat informasi secara lengkap.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang akan dilakukan untuk menganalisis data tertulis seperti dokumen. Menurut Sugiyono (2011), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu sehingga pengumpulan data berasal dari dokumen, surat kabar, catatan harian, media cetak maupun online lainnya yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan dalam penelitian.

Data yang ingin diperoleh peneliti dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan

dengan pertimbangan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X serta perencanaan pajak yang efektif untuk PT X.

#### **G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif (Keabsahan Data)**

Pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada criteria yang digunakan agar data yang sudah terkumpul valid kebenarannya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2014), Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai berikut :

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, apabila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebnih lanjut kjepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dalam waktu dan alat yang berbeda. Terdapat 2 (dua) cara menurut Moleong (2014), yaitu :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sejenis tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda, yaitu dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara dan disaat lain menggunakan observasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **H. Metode Analisis Data**

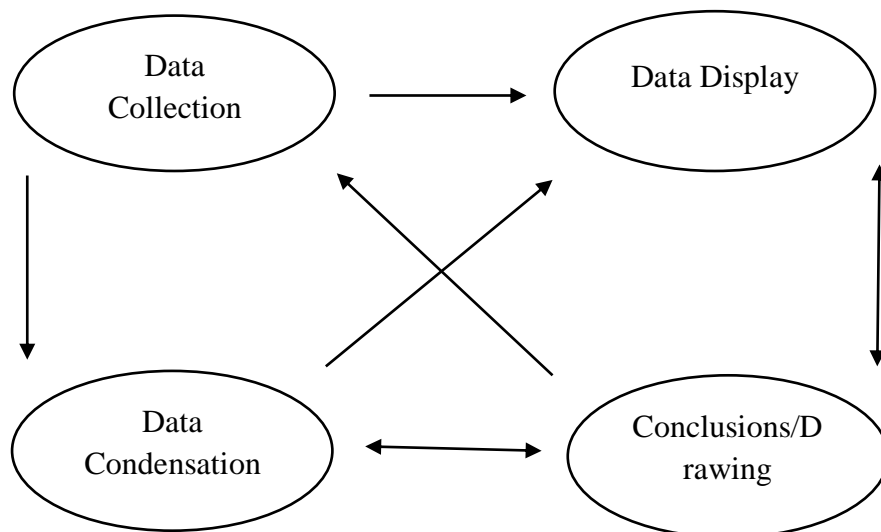
Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang secara spesifik dimaksudkan untuk membangun suatu teori tertentu yang betul-betul didasarkan pada data spesifik yang ada di lapangan (*grounded theory*)”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.



Kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2009).

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yang meliputi analisis berdasarkan pada objek penelitian yang telah disusun. Analisis data dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun model analisa dari teori yang ada dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
 Sumber: Analisis Miles, Huberman, Sugiyono 2009

### 1. *Data Collection*

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: Pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Hal tersebut disebabkan data yang diinginkan oleh peneliti lapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen, akan tetapi dapat berbentuk pernyataan atau gambar. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan (observasi) secara langsung di PT X, untuk memperoleh data atau informasi yang mendalam maka peneliti melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah dituju, begitupun juga untuk dokumentasi yang diperlukan peneliti untuk melakukan proses penelitian lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan dengan berulang-ulang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

### 2. *Data Condensation*

Data ini mengacu pada proses pemilihan fokus, penyederhanaan, abstrak, dan/atau mengubah data dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Proses kondensasi ini sangat penting dilakukan sehingga data yang diperoleh akan kuat dan sesuai dengan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan transkrip wawancara sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yang berada di PT X.

### 3. *Data Display*

Proses *data display* dilakukan setelah kondensasi data, yaitu data disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Penyajian data yang bersumber

dari situs-situs lokasi penelitian yang disajikan disesuaikan dengan format yang sudah diatur. Penyajian data diikuti oleh analisis data yakni data yang telah dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang penuh dengan informasi dan pengetahuan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data dan menganalisa data sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di PT X.

#### 4. *Conclusion/drawing*

Proses setelah penyajian data dilakukan, maka sebelum data disajikan dan dianalisis, peneliti berusaha mencari arti terhadap data yang dikumpulkan. Data yang telah disajikan diinterpretasi dan pada tahap ini peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang topik yang diteliti yaitu perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT X. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang berhubungan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif akan dilakukan dengan cara pencatatan terhadap pengamatan fakta yang dilihat oleh peneliti. Menurut Taylor dan Bogdan, dalam Suyanto dan Sutinah (2007) menjelaskan pengertian kualitatif dapat diartikan sebagai “penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti”. Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan yang melatarbelakangi penelitian kualitatif. Oleh karena itu, sebelum membicarakan mengenai bagaimana metode dan prosedur melakukan suatu penelitian kualitatif perlu untuk terlebih dahulu memahami teori dan pendekatan yang melatarbelakangi metode penelitian kualitatif (Suyanto dan Sutinah, 2007).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan dan menguji hipotesis (Zuriah, 2009).

Berdasarkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dikarenakan

tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan, mendeskripsikan, serta menguraikan permasalahan mengenai prosedur pertimbangan PT X dalam menetapkan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang efektif untuk PT X.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan arahan untuk melakukan penelitian dan juga penjelasan mengenai batasan-batasan masalah sehingga masalah yang diteliti tidak menjadi luas dan melebar. Penelitian ini berfokus pada :

- a. Dasar pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap.
- b. Pemilihan metode yang tepat dan sesuai dengan perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang efektif untuk PT X.

## **C. Pemilihan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian memberikan informasi terkait wilayah atau tempat peneliti mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi penelitian digunakan peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dituju adalah kota Surabaya.

Situs penelitian merupakan letak penelitian yang sebenarnya dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang akurat, valid dan dibutuhkan dalam penelitian. Situs penelitian dalam penelitian ini adalah PT X. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena berdasarkan informasi yang diterima oleh peneliti pada saat melakukan pra-riset bahwa pihak PT X menanggung seluruh beban pajak

karyawannya, dan penelitian ini akan memberikan masukan bagi perusahaan mengenai metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan. Masukan tersebut diharapkan akan membantu perusahaan dalam menghemat beban Pajak Penghasilan Badan.

#### **D. Sumber Data**

Menurut Lofland (1984) dalam Moleong (2014) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Azwar (2013), berdasarkan sumbernya, data dapat diolongkan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian kualitatif lebih cenderung mengutamakan wawancara dan observasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini antara lain :

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dan sumbernya. Sumber data tersebut berasal dari informan (narasumber) yang berhubungan dengan objek penelitian berupa kata-kata, serta tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Adapun yang akan diwawancarai yaitu karyawan PT X yang bekerja di divisi akuntansi dan perpajakan.
2. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber datanya. Sumber data diperoleh terlebih dahulu dari pihak lain yang berasal dari luar penelitian. Data ini merupakan data pendukung yang mempunyai tujuan untuk memperkuat data primer. Data sekunder didalam penelitian meliputi dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan,

dsan arsip-arsip yang mempunyai kaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah daftar gaji karyawan tetap bulan Januari-Desember 2016, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 bulan Januari-Desember, serta perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Menurut Arikunto (2010) Instrumen Penelitian merupakan alat untuk memperoleh data dan dipilih sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam melakukan penelitian. Instrumen penelitian merupakan salah satu alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data yang bertujuan agar kegiatan penelitian tersebut menjadi sistematis dan mudah. Instrumen penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri,
2. Pedoman Wawancara, yaitu serangkaian pertanyaan yang akan diajukan peneliti terhadap informan yang dilakukan secara lisan dalam upaya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
3. Alat Perekam, adalah alat yang digunakan peneliti guna merekam kegiatan yang dilakukan peneliti dengan narasumber sebagai bukti *real* dalam penelitian
4. Catatan, adalah suatu media yang digunakan peneliti menulis jawaban yang diberikan oleh narasumber.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu kegiatan atau cara untuk memperoleh atau mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti selama melakukan penelitian. Data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti akan digunakan sebagai bahan untuk dilakukan analisis lebih lanjut untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat di pertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya, penulis mempergunakan pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Observasi

Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa *“through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Maksudnya adalah melalui pengamatan atau observasi maka peneliti akan belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Observasi akan dilakukan secara langsung dan mencatat segala sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan fokus penelitian.

Penelitian ini pertama-tama peneliti melakukan observasi secara tidak langsung melalui sosial media untuk mengetahui perencanaan pajak yang di terapkan oleh PT X, dan salah satu sosial media yang mendukung adalah website dari PT X. Selanjutnya peneliti melakukan observasi secara langsung di PT X.

### 2. Wawancara

Menurut Moleong (2014) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang



mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu., wawancara merupakan suatu interaksi antara peneliti dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian melalui proses tanya jawab secara lisan. Proses dalam interaksi tersebut akan menghasilkan informasi ataupun keterangan-keterangan yang dibutuhkan sebagai data penelitian.

Narasumber wawancara dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada di PT X, khususnya mereka yang bekerja pada bagian Keuangan dan Perpajakan. Pertanyaan yang diajukan adalah tentang apa saja mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan dengan pertimbangan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X serta perencanaan pajak yang efektif untuk PT X. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara harus sesuai dengan fokus penelitian agar mendapat informasi secara lengkap.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang akan dilakukan untuk menganalisis data tertulis seperti dokumen. Menurut Sugiyono (2011), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu sehingga pengumpulan data berasal dari dokumen, surat kabar, catatan harian, media cetak maupun online lainnya yang mempunyai hubungan dengan kebutuhan dalam penelitian.

Data yang ingin diperoleh peneliti dengan teknik pengumpulan data dokumentasi ini adalah mengenai kondisi dan hal-hal yang berhubungan

dengan pertimbangan perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X serta perencanaan pajak yang efektif untuk PT X.

#### **G. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Penelitian Kualitatif (Keabsahan Data)**

Pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada criteria yang digunakan agar data yang sudah terkumpul valid kebenarannya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2014), Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Adapun peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik sebagai berikut :

##### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik pemeriksaan keabsahaan data dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, apabila menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebnih lanjut kjepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Triangulasi sumber dalam penelitian ini digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dalam waktu dan alat yang berbeda. Terdapat 2 (dua) cara menurut Moleong (2014), yaitu :

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Triangulasi teknik dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sejenis tetapi teknik pengumpulan data yang digunakan berbeda, yaitu dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan wawancara dan disaat lain menggunakan observasi dan dokumentasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.

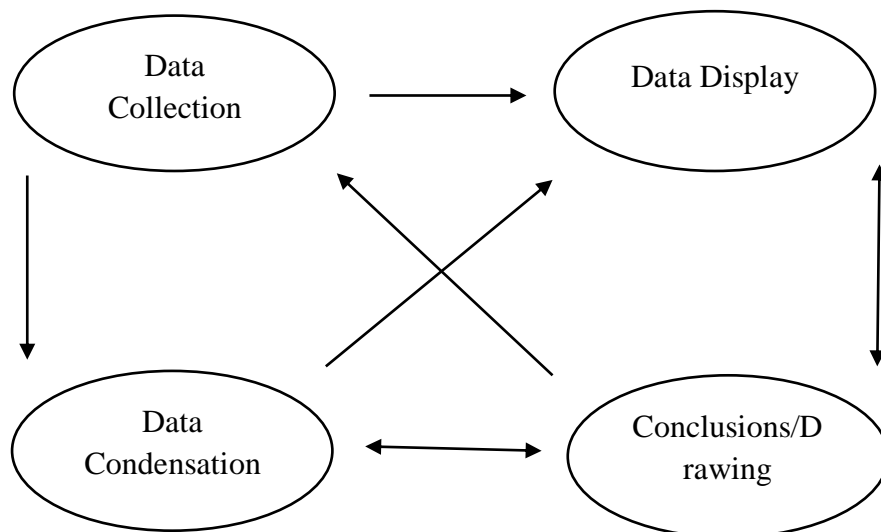
#### **H. Metode Analisis Data**

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009) menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang secara spesifik dimaksudkan untuk membangun suatu teori tertentu yang betul-betul didasarkan pada data spesifik yang ada di lapangan (*grounded theory*)”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data (Sugiyono, 2009).

Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yang meliputi analisis berdasarkan pada objek penelitian yang telah disusun. Analisis data dalam penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dilakukan sejak pada saat memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009), yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Adapun model analisa dari teori yang ada dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
 Sumber: Analisis Miles, Huberman, Sugiyono 2009

### 1. *Data Collection*

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: Pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Hal tersebut disebabkan data yang diinginkan oleh peneliti lapangan berbeda dan tidak selalu berbentuk dokumen, akan tetapi dapat berbentuk pernyataan atau gambar. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengamatan (observasi) secara langsung di PT X, untuk memperoleh data atau informasi yang mendalam maka peneliti melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah dituju, begitupun juga untuk dokumentasi yang diperlukan peneliti untuk melakukan proses penelitian lebih lanjut. Pengumpulan data dilakukan dengan berulang-ulang sesuai dengan data yang dibutuhkan dan kejenuhan data yang berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

### 2. *Data Condensation*

Data ini mengacu pada proses pemilihan fokus, penyederhanaan, abstrak, dan/atau mengubah data dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Proses kondensasi ini sangat penting dilakukan sehingga data yang diperoleh akan kuat dan sesuai dengan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan transkrip wawancara sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada informan yang berada di PT X.

### 3. *Data Display*

Proses *data display* dilakukan setelah kondensasi data, yaitu data disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Penyajian data yang bersumber

dari situs-situs lokasi penelitian yang disajikan disesuaikan dengan format yang sudah diatur. Penyajian data diikuti oleh analisis data yakni data yang telah dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang penuh dengan informasi dan pengetahuan. Pada tahap ini peneliti menyajikan data dan menganalisa data sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di PT X.

#### 4. *Conclusion/drawing*

Proses setelah penyajian data dilakukan, maka sebelum data disajikan dan dianalisis, peneliti berusaha mencari arti terhadap data yang dikumpulkan. Data yang telah disajikan diinterpretasi dan pada tahap ini peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan tentang topik yang diteliti yaitu perencanaan pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT X. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang berhubungan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Kota Surabaya

###### a. Geografis Kota Surabaya

Kota Surabaya adalah ibu kota provinsi Jawa Timur, Indonesia, sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 796km sebelah timur Jakarta, atau 415km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar 350,54km<sup>2</sup> dengan penduduknya berjumlah 2.765.487 jiwa (2010). Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10.000.000 jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya terkenal dengan sebutan *Kota Pahlawan* karena sejarahnya yang sangat diperhitungkan dalam perjuangan *Arek-arek Suroboyo* (Pemuda-pemuda Surabaya) dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari serangan Penjajah.

Secara geografis, Surabaya berada pada 07°09'00" – 07°21'00" Lintang Selatan dan 112°36' – 112°54' Bujur Timur. Luas wilayah

Surabaya meliputi daratan dengan luas 350,54 km<sup>2</sup> dan lautan seluas 190,39 km<sup>2</sup>. Seluruh bagian Kota Surabaya berbatasan langsung dengan :

Utara	: Selat Madura
Selatan	: Kabupaten Sidoarjo
Barat	: Kabupaten Gresik
Timur	: Selat Madura

Surabaya terletak di tepi pantai utara provinsi Jawa Timur. Wilayahnya berbatasan dengan Selat Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Gresik di sebelah barat. Sebagian besar wilayah Surabaya merupakan dataran rendah yaitu 80,72% dengan ketinggian antara 0,5 – 5m atau 3 – 8m di atas permukaan laut, sedangkan sisanya merupakan daerah perbukitan yang terletak di wilayah Surabaya Barat (12,77%) dan Surabaya Selatan (6,52%). Di wilayah Surabaya Selatan terdapat 2 bukit landai yaitu di daerah Lidah dan Gayungan yang ketinggiannya antara 20 - 25m di atas permukaan laut dan di wilayah Surabaya Barat memiliki kontur tanah perbukitan yang bergelombang. Struktur tanah di Surabaya terdiri dari tanah alluvial, yaitu tanah hasil endapan sungai dan pantai, dan di bagian barat terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Di Surabaya terdapat Kali Mas, yaitu satu dari dua pecahan Sungai Berantas. Kali Mas adalah salah satu darau tiga sungai utama yang membelah sebagian wilayah Surabaya bersama dengan



Kali Surabaya dan Kali Wonokromo. Area sawah dan tegalan terdapat di kawasan barat dan selatan kota, sedangkan area tambak berada di kawasan pesisir timur dan utara.

b. Visi dan Misi Kota Surabaya

Kota Surabaya memiliki visi Menuju Surabaya Lebih Baik , visi tersebut memiliki makna strategis dan cerminan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. Perubahan di tengah jumlah penduduk yang terus bertambah membawa tuntutan untuk meningkatkan daya dukung kota secara berkelanjutan, karakteristik penduduk yang terus mengalami perkembangan, derajat sumber daya manusia yang harus terus didukung oleh peningkatan kualitas lingkungan kota, peningkatan partisipasi masyarakat dan kualitas pelayanan public.

Misi Kota Surabaya :

- 1) Misi membangun kehidupan kota yang lebih cerdas melalui peningkatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, keterampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2) Misi menghadirkan suasana kota yang manusiawi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan public, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya kota untuk kesejahteraan warga.
- 3) Misi mewujudkan peri kehidupan warga yangbermatabat melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang

mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreatifitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi local yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional.

- 4) Misi menjadikan Kota Surabaya semakin layak huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang berwawasan lingkungan.

(sumber : Kota Surabaya, 2015)

## 2. Gambaran Umum PT X

### a. Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha PT X

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Kegiatan Usaha Utama

2.1 Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu

#### 2.2 Memberikan Kredit

#### 2.3 Menerbitkan surat pengakuan hutang

2.3.1 Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun- untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :

- 2.3.2 Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  - 2.3.3 Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud,
  - 2.3.4 Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah,
  - 2.3.5 Sertifikat Bank Indonesia (SBI),
  - 2.3.6 Obligasi,
  - 2.3.7 Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
  - 2.3.8 Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai -dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 2.4 Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- 2.5 Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain

2.6 Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

2.7 Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek

2.8 Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan/ atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang

2.9 Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.10Menyelenggarakan usaha-usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik didalam maupun di luar negeri.

### 3. Kegiatan Usaha Penunjang

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut :

3.1 Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga

3.2 Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak

- 3.3 Membeli sebagian atau seluruh agunan baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib segera dicairkan secepatnya
- 3.4 Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
- 3.5 Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan atau mendirikan perusahaan baru sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
- 3.6 Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan -berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang berlaku
- 3.7 Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun yang berlaku

3.8 Memberi bantuan teknis kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan --Kabupaten/ Kota seluruh Jawa Timur baik yang berbentuk Perusahaan Daerah maupun yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dalam rangka pengelolaan kas dan keuangan

3.9 Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Budaya Perusahaan

1. Integritas

1.1 Menunjukkan kejujuran.

1.2 Menjaga komitmen.

1.3 Berperilaku secara konsisten.

2. Fokus Pelanggan

2.1 Berusaha untuk memahami dan mendidik pelanggan.

2.2 Mengambil tindakan untuk memenuhi kebutuhan dan keluhan pelanggan.

2.3 Membuat sistem umpan balik bagi pelanggan/hubungan yang kolaboratif.

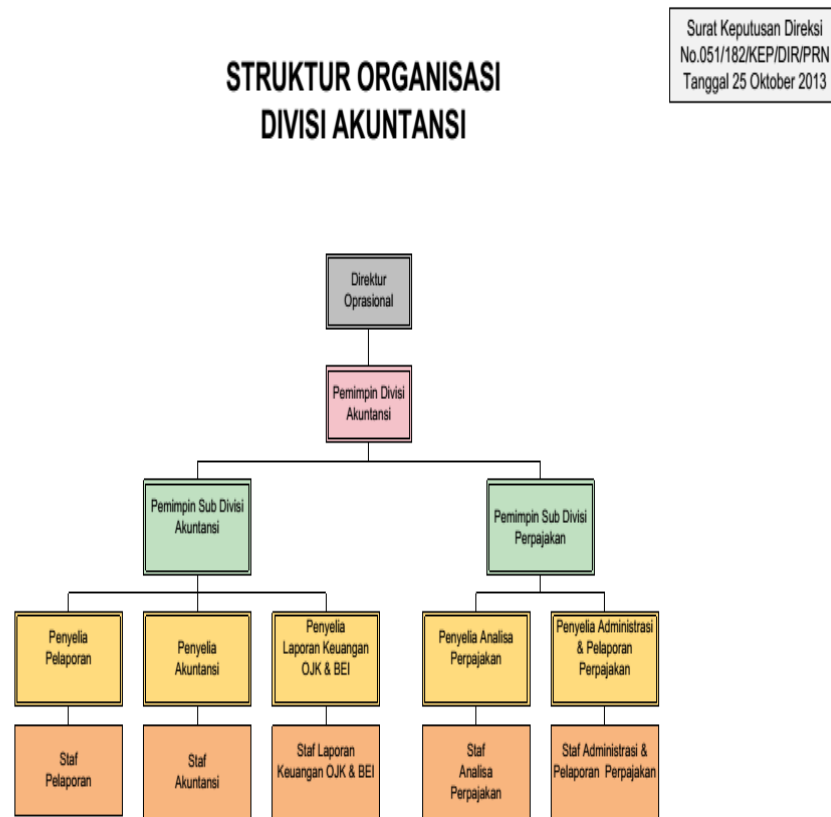
3. Pengaruh

3.1 Berpakaian yang pantas.

3.2 Menampilkan sikap profesional.

3.3 Berbicara penuh percaya diri.

c. Struktur Organisasi Divisi Akuntansi dan Perpajakan di PT X



Gambar 3. Sumber : Website PT X Tahun 2016

## B. Penyajian Data

### 1. Dasar Pertimbangan PT X Dalam Menanggung Pajak Penghasilan

#### Pasal 21 Karyawan

#### 1.1 Kebijakan PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21

##### Karyawannya

Kebijakan PT X terhadap pajak penghasilan pasal 21 karyawannya disampaikan oleh Bapak Mahfud selaku kepala subdivisi perpajakan, sebagai berikut ini :

“Kalo pajaknya dibayar perusahaan atau di tanggung perusahaan sehingga otomatis kita di setiap membikin angsuran untuk pph pasal 25 nya untuk pajek perusahaannya sendiri itu nanti kita lakukan koreksi fiskal karena kan itu tiap-tiap itu kan harus di koreksi fiskal, meskipun di perusahaan itu di neraca

komersialnya itu di anggep sebagai biaya tapi di neraca fiskalnya dia tidak boleh di akui, sehingga bisa menambah juga beban pajak badannya juga sebenarnya tapi ya daripada apa itu, untuk selama ini sih di sisi perusahaan gak ada masalah ya karena jumlah atau apanya itu ya kita ngitung pajak perusahaan di bandingkan pph 21 ga ada apa-apanya jumlah pph 21 nya di banding pajak perusahaannya karena tiap bulan paling kita bayar berapa M, kurang dari 10M tapi kalo perusahaan ya puluhan M kita perbulan sehingga ya nggak ngaruh lah makanya kebijakan dari itu udah mulai dari proses yang panjang ya, beberapa tahun yang lalu itu dari awalnya sih emang semua dilakukan perusahaan dari awal dulu ternyata ya ngikuti perhitungan ya tetep ga ada masalah ya kita gak pengaruh ke rugi laba kita gak pengaruh, ga terlalu signifikan lah kan kalo memang perusahaan bisa menanggung berarti karyawan juga lebih tenang kan nggak usah pusing-pusing ngitung sendiri, waktu kerjanya gak dihabiskan untuk ngitung pajak jadi ya mereka ya pure fokus untuk kerja, ya yang ngurus pajak biar temen-temen yang bagian pajak, temen-temen lain ya fokus ke pekerjaan masing-masing dan gajinya juga punya kepastian, nggak ada kurang-kurangnya lagi, kan gitu to. Tugas saya sebagai pimpinan subdiv pajak disini ya membantu temen-temen bagaimana terutama mereka enjoy, lapor udah nihil ga ada perhitungan-perhitungan ruwet dan kurang bayar lah dan macem-macem kecuali kalo memang temen-temen itu punya usaha sendiri di luar ya mau nggak mau mereka harus nggabung ya kan, nah itu uda urusan pribadi tapi selama ini batas pendapatan itu diperoleh dari PT X semuanya uda saya jadikan satu dengan peraturan yang ada ya bisa saya rapikan itu jadi satu perhitungan aja. Jadi contohnya untuk honor kemarin saya melakukan perubahan, katakanlah honor sekarang honor ngajar 1 jam lima ratus ribu, kalo dulu cuman di potong perhitungannya di itung dengan non pegawai berarti kan dikalikan 50% baru tarif ya, sehingga tarifnya kecil kan, tapi kelemahannya temen-temen di akhir tahun kurang bayar banyak kan kasihan, emang kadang-kadang honor ya kayak gitu cuman kan mereka kalo dapet uang hari ini ya uda habis hari ini kan, ya mungkin ada sebagian yang di tabung tapi kan mereka ga memikirkan di akhir tahun mereka kurang bayar pajek, nah itu saya antisipasi temen-temen biar ga kesulitan di akhir tahun, kemarin bikin kebijakan nilai honor nya kita kurangi itu kita potong 15%, katakanlah honor nya lima ratus ribu ini lagi dalam proses untuk perubahan tarifnya itu jadi kemarin sudah saya diskusikan dengan divisi SDM mereka setuju jadi peralihan ini tidak membebani perusahaan juga, jadi honor yang tadi katakanlah lima ratus ribu nantinya kita ajukan lagi perubahan dan nilai honor nya jadi tiga ratus lima puluh katakanlah jadi kan berkurang seratus lima puluh ribu kalo di hitungnya kok 15% memang kelihatannya awalnya gede tapi dibandingkan kalo



dihitung non pegawai tadi temen-temen kurang bayarnya lebih besar dari itu bisa puluhan juta bisa belasan juta kan gitu ya, yang penting kan sekarang mereka uda nerima bersih tiga ratus lima puluh tapi pajek mereka sudah tutup mata, ga pusing-pusing, ga kuatir kurang bayar. Itu salah satu planning biar lebih rapi dan temen-temen bisa fokus kerja, tapi di sisi lain dari situ perubahan tadi ya itu tadi, di sisi perusahaan kan sebenarnya ga ada tambahan biaya, karena apa, karena tadinya kan memang lima ratus ribu tapi kita kecilkan jadi tiga ratus lima puluh ada selisih seratus limapuluh ribu itu kan sebenarnya yang dikeluarkan perusahaan seratus limapuluh kan di tahan di perusahaan kan, nah itu nanti untuk mbayari yang pajaknya ini kan sama aja kan, sebenarnya beban-beban karyawan juga cuman sebenarnya dengan ngurangi tarif kita alihkan menjadi di hitung jadi satu gitu ya, jadi di anggap honor itu atau honor untuk ngajar atau honor untuk ngetes pegawai baru gitu itu sudah di input sebagai pendapatan pegawai, bukan non pegawai lagi, jadi kan gabung sama gaji sama bonus, kita anggap kayak pendapatan apa ya, tidak tetap ya, honor itu kan gak tiap bulan diterima, tapi kita hitung seperti perjadiin atau apa jadi ikut di parelnya jadi temen-temen lebih enak kan, gak pusing di akhir tahunnya tapi meskipun ada potongan, mereka ya sama ajalah gak di potong pun nanti kurang bayarnya tambah melembung kan bisa belasan juta puluhan juta, duitnya uda habis malah suruh bayar kurang pajek mending sekarang saya potong agak banyak sedikit tapi temen-temen akhir tahun udah enjoy, jadi itu salah satu pembenahan di pph 21 yang dilakukan untuk bikin plan yang lebih bagus, jadi saya berusaha membantu temen-temen karyawan ini gak pusing-pusing dengan pajak tapi di sisi lain saya juga nggak mau mberatin atau menambah beban pajak untuk perusahaan karena pph 21 kan beban perusahaan, saya nggak mau mbebanin jadi pengalihan aja kan pengalihan biayanya itu, tadinya di nikmatin temen-temen tapi saya potong aja tapi untuk perusahaan akhirnya juga sama-sama lah, salah satu contoh untuk plan pph 21 ini.” (Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibayar oleh perusahaan atau pajak yang ditanggung oleh perusahaan secara otomatis direkap dalam angsuran pembayaran PPh Pasal 25 yang telah dilakukan koreksi fiskal, meskipun pada perusahaan terdapat neraca komersial yang dianggap sebagai biaya, akan tetapi pada neraca fiskalnya tidak boleh diakui dan bisa menambah beban

pajak, hal ini tentu tidak ada permasalahan selama perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 karyawannya. Maka dari itu PT X memilih untuk menanggung seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para karyawan PT X lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar.

## **1.2 Metode Yang Digunakan Oleh PT X Terhadap PPh Pasal 21 Atas Gaji Karyawan**

Dalam hal PPh 21 atas gaji karyawan, PT X menggunakan metode menanggung gaji karyawan yang dilakukan oleh PT X disampaikan oleh Bapak Mahfud selaku kepala subdivisi perpajakan, sebagai berikut ini :

“Ya kalo di itung matematikanya sih kayaknya memang perusahaan lebih rugi ya kalok pajak itu di tanggung perusahaan tapi kan kita kembali lagi ke kerjasama antara perusahaan dengan karyawan ya kita anggep aja itu sebagai tambahan kesejahteraan karyawan kan gitu, nah kita melihatnya dari sisi itu, jadi jangan itung-itungan angka tok, ya kan kita bisa ngirit kita kurangi tapi karyawannya gak sejahtera, maksudnya yang tadinya itu enak udah nggak mikir-mikir pajek, sekarang jadi mikir pajek berarti kan kesejahteraannya kurang, mereka ada tambahan kerjaan lagi ngitung pajak sendiri, kan kasihan, kalo memang kita bisa jadikan satu diperusahaan ya mending di perusahaan kan gitu, kita bisa apa itu kelola disitu kan, kan gak semua pegawai, kalo semua kena pajak yang tinggi, kalo memang yang outsourcing apa yang gajinya kecil di bawah PTKP ya nggak usah bayar juga kan kalo emang dibawah, kan gitu, jadi seperti itu kan sama, jadi kan sebenarnya prinsipnya itu tidak hanya kita melihat itu oh biaya terus bisa ngurangi laba, nggak hanya disitu yaa labanya tinggi buat apa kalo karyawan nggak sejahtera ya kan, kan ini kita kurangi, karena berkurang memang labanya tinggi tapi taun depan labanya tinggi tapi karyawan nggak sejahtera akhirnya kinerjanya turun ya kan, naik setaun tok, taun berikutnya ambrol, wong orangnya gak niat kerja akhirnya kan terbebani, nah kan percuma kalo kita tanggung kan mereka ga terpikir jadi mereka ga terbebani pajek

kita handle pajek di divisi sub pajek ini, sehingga mereka lebih fokus di kinerjanya masing-masing, sehingga dengan harapan kalo mereka fokus ke pekerjaan masing-masing, kinerja mereka meningkat terus, jadi perusahaan minta apa atau apa dengan target segini, insyaAllah karena mereka ga mikir pajek lagi, akan tercapai target mereka ya kan, nah mending seperti itu kan, kita kasih reward seperti itu, nggak hanya di pajak nanti kan kadang-kadang di satu bulan laba tercapai kita kadang-kadang keluarkan bonus juga, bonus itu kalo orang nrima di potong-potong ya nggak lego kan, mending yauda bayar 1x gaji ya 1x gaji, pajeknya kan di tanggung a jadi mereka nrimanya juga enak, lain kan kalo kamu tak kasi hadiah tapi kamu tak potong ini, aslinya yang nrima kan opo ini kok malah dikit, boongan ini, akhirnya kan yang bener kamu gaji berapa ? 9 juta ? kasih lah 9 juta, pajeknya udah urusan kantor, mereka kalo kayak gitu yawes senang kan, jadi seperti itu. Karena dibandingkan pph 21 yang di tanggung dengan pph badan ya gak ada apa-apanya, perbulannya jauh.” (Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa meskipun beban pajak perusahaan semakin bertambah karena perusahaan telah menanggung beban pajak karyawannya, akan tetapi alasan PT X tidak mempermasalahkan adalah dalam menanggung seluruh beban pajak karyawannya dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan beban pajak perusahaan dan pemberian bonus berupa satu kali gaji adalah demi kesejahteraan karyawannya, dengan harapan para karyawan lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dan target dalam pekerjaan bisa dicapai.

## **2. Perencanaan Pajak Yang Efektif Untuk PT X**

### **2.1 Alur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT X**

Pada prinsipnya, pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun buku, tergantung tahun yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian,

untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenaan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong hak lain, atau di bayar sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun, besarnya PPh yang masih urang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dilaporkan.

Adapun pelunasan PPh dilakukan dengan cara membayar PPh yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau dengan cara lainnya, seperti lewat ATM atau berbagai cara online system serta offline system lainnya. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mahfud selaku kepala subdivisi perpajakan, sebagai berikut ini :

“Kalo alurnya, kita kan menghitung PPh ini untuk pegawai tetap maupun yang tidak tetap, kalo pegawai tetap itu kemarin juga sudah saya benahi beberapa honor yang honor ngajar, honor nguji karyawan baru, itu di hitung sebagai non-tetap, akhirnya mereka temen-temen kasian di akhir tahun kan hasilnya ga nihil kan ada dua pendapatan nah untuk yang tahun 2017 nanti udah saya rapikan, kalo 2016 kan setiap ada pembayaran gaji itu kan dari SDM di bayar, nanti SDM akan setor data nyata itu ke temen-temen pajak dan dari situ temen-temen akan menghitung PPh Pasal 21 per-bulannya, setiap ada penerimaan seperti bonus atau apa itu nanti diitung lagi. Terus untuk yang tidak tetap itu biasanya untuk fee-fee bendahara, kita kan ngasih fee atau apapun itu atau mungkin honor-honor orang diluar itu kan juga yang masuk kriteria PPh 21 kita hitung juga sesuai tarifnya, nah itu data-datanya di ambil dari divisi umum kan, karena yang proses pembayaran dari divisi umum, nah itu

terus nanti di gabung, nanti yang dari teman-teman sini langsung lapor ke kantor pajak melalui e-filing, itu seperti itu alurnya.” (Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa PT X membagi antara pegawai tetap dan pegawai non tetap, dengan divisi SDM sebagai perantara pemberi gaji kepada setiap karyawan tetap, serta setiap data pemberian gaji karyawan tetap akan di setorkan kepada divisi perpajakan yang akan di hitung Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setiap karyawannya, untuk pemberian gaji karyawan non tetap akan disetorkan kepada divisi umum, dan dari data divisi SDM serta divisi umum akan dijadikan satu untuk dilaporkan ke kantor pajak melalui e-filling.

## **2.2 Perhitungan PPh Pasal 21 di PT X**

Bagi pegawai tetap, besarnya Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap adalah sebesar penghasilan netto dikurang PTKP. Sedangkan penghasilan netto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan :

- a. Biaya jabatan
- b. Iuran-iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut :

$\text{PPh Pasal 21} = \text{Penghasilan Kena Pajak} \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$

$$= (\text{Penghasilan netto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$$

$$= (\text{Penghasilan bruto} - \text{biaya jabatan} - \text{iuran pensiun dan iuran THT/JHT yang dibayar sendiri} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$$

Sedangkan bagi pegawai tidak tetap, Penghasilan Kena Pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan, yang memenuhi ketentuan :

1. Mempunyai NPWP
2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu Pemotong PPh Pasal 21, serta
3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya

$$\text{PPh Pasal 21} = 50\% \times (\text{Kumulatif Penghasilan Bruto} - \text{PTKP}) \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$$

Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto.

$$\text{PPh Pasal 21} = 50\% \times \text{Kumulatif Penghasilan Bruto} \times \text{tarif Pasal 17 UU PPh}$$

Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mahfud selaku kepala subdivisi perpajakan, sebagai berikut ini :

“Jadi kalo detailnya sih di Mas Dito ya, cuman secara garis besarnya kita itu tadi, pertama kita golongkan dulu yang mana yang tetap sama yang gak tetap, kita juga rapikan yang tadinya komisaris itu di anggap non anu ya, ada juga pegawai sama non pegawai, kemarin ada beberapa temen –temen yang salah persepsi itu notaris eh komisaris sama dewan komisaris itu

di anggap non pegawai padahal kalo kita lihat kriteria di undang-undangnya dia sebenarnya masuk ke definisi pegawai makanya tahun ini sudah saya rapikan sehingga inshaAllah nanti tahun ini mereka kurang bayarnya sedikit kalo komisaris kan kadang-kadang masih mendapatkan pendapatan atau gaji dari tempat lain, nah itu kemarin mereka mengeluh kurang bayarnya banyak, karena mungkin dari yang disini harusnya dihitung pegawai tapi dihitung jadi non pegawai karena kan kalo non pegawai kan dikalikan 50% dulu baru tarif kalo pegawai kan nggak, jadi itu. Jadi kita juga menggunakan PTKP sesuai yang terakhir jadi kita dua tahun ini bisa menghemat lumayan sekitar 14M ya tahun 18 bisa nambah 6M untuk dua tahun terakhir ini kita bisa hemat karena PTKP nya dinaikkan sehingga yang kena pajaknya kan lebih kecil, jadi tiap kita ada perhitungannya ya tiap kita ada pembagian gaji ya kita itung lagi”. (Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa proses penghitungan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan oleh PT X terhadap karyawan adalah digolongkan terlebih dahulu, antara pegawai tetap yang langsung dihitung pajak terhutangnya dan pegawai non tetap yang penghasilannya dikalikan 50% terlebih dahulu. Serta perhitungan pajak terutang atas karyawan yang dihitung sesuai dengan peraturan PTKP terbaru yang tarifnya telah diperbaharui sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang mengakibatkan rendahnya pajak penghasilan badan.

Berikut peneliti gambarkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 salah satu karyawan tetap PT X dimana PT X memberlakukan kebijakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan menggunakan *Net Method*, adapun alasan PT X menggunakan kebijakan ini adalah sebagai strategi agar karyawan merasa puas dan lebih termotivasi untuk meningkatkan produktivitas kerjanya karena

pajak penghasilannya telah ditanggung oleh perusahaan, berikut perhitungan dengan menggunakan *Net Method* dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 7 Perhitungan *Net Method* Yang Dilakukan Oleh PT X**

No	Keterangan	Nominal	Jumlah
1	Gaji Pokok	(12 x 19.916.987)	239.003.844
2	Pengurang : a. Biaya Jabatan b. Premi Aspek c. Premi Pensiun d. BPJS	500.000 300.489 262.929 80.000 <u>(1.143.418 x 12)</u>	     <u>13.721.016</u> 225.258.828
3	PTKP (K/2) Wajib Pajak Tanggungan Istri Tanggungan Anak (2)	54.000.000 4.500.000 9.000.000	   <u>67.500.000</u> 157.782.828
4	PhKP Setahun 5% x 50.000.000 15% x 107.782.828	2.500.000 16.167.424,2	  18.667.424,2
5	PPh Pasal 21 Sebulan		1.555.618,7
6	PPh Pasal 21 Dipotong Setahun		18.667.424,2
7	PPh Pasal 21 Dipotong Sebulan		1.555.618,7

Dari perhitungan diatas terlihat jumlah penghasilan karyawan SAR selama satu tahun adalah Rp 239.003.844,-. Jumlah pajak penghasilannya dalam satu tahun adalah sebesar Rp 18.667.424,2 dan dalam satu bulan adalah sebesar Rp 1.555.618,7. Namun biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan.



### 2.3 Perencanaan Pajak PPh 21 Yang Dilakukan Oleh PT X

Hasil dari suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mahfud selaku kepala subdivisi perpajakan, sebagai berikut ini :

“Kalo diitung perencanaan ya mungkin perencanaanya ya mungkin kita yang rutin pertahun jangan sampe proses perhitungan-perhitungan itu terlambat, kalo kita kan kalo planning sebenarnya kan untuk ngurangi denda-denda dari pajak, kalo sampe terlambat pelaporannya perhitungannya kalo perhitungan terlambat otomatis pelaporan terlambat, itu potensi untuk denda, seperti itu yang kita planning jadi temen-temen disini paling planningnya di operasional hariannya aja, jadi untuk kayak strategi atau apa di pph 21 gak terlalu, kita planningnya kalo ada aturan baru aja, langsung kita terapkan kalo lebih menguntungkan atau memperkecil biayanya itu, biasanya yang banyak strateginya sih di pph 25 nya di pph badannya, kalo 21 paling-paling kita menjaga prosesnya itu lancar, jangan terlambat, jangan di tunda dan akurat, seperti saya bilang, kalo ada perubahan di data pegawai ya harus di sesuaikan dengan peraturannya, jadi ga sampe berlarut-larut, jangan sampe jadi lebih bayar atau kurang bayar, itu kan nanti potensi denda juga, paling kita jaga di operasionalnya pelaporannya maupun prosesnya, kita juga uda di bantu aplikasi yang lumayan lah untuk bisa membantu percepatan perhitungannya, gitu.”  
(Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat di simpulkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X adalah penghindaran

terhadap denda dengan cara menghitung dan melaporkan pajak terhutangnya secara tepat waktu, serta mengikuti aturan perpajakan yang terbaru apabila peraturan tersebut lebih menguntungkan atau memperkecil biaya pajak terutang pada PT X dan dibantu oleh aplikasi yang mempermudah perhitungan pajaknya.

#### **2.4 Efisiensi Perencanaan Pajak Yang dilakukan Oleh PT X**

Menganalisis informasi basis data yang ada, hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi. Teori tersebut diperkuat dengan pernyataan dari Bapak Mahfud selaku kepala subdiv perpajakan, adalah sebagai berikut :

“Masalah efisiensi ya, kalo efisiensi ini kita cenderung efisiensi ini bukan identik dengan terus harus mengurangi yang semestinya, efisiensi dalam pajak saya melihatnya adalah kita memanfaatkan aturan-aturan yang ada di pajak yang mungkin selama ini kita belum paham atau seperti tadi itu yang tadi kan komisaris harusnya pegawai, temen-temen ndefiniskannya non pegawai, hal-hal seperti itu akan tetep saya rapikan, jadi kita benahi definisi yang ada di pph 21 nya terus juga masalah proses perhitungannya, kalo proses perhitungan uda paten dari pajak seperti itu tapi kan ada aturan-aturan main kayak seperti ya kayak PTKP kalo memang itu harus anaknya tambah satu harus cepet dilakukan mungkin di tahun berikutnya nah seperti itu ya harus ketat jangan sampek kelewatan, kalo kelewatan kan harusnya dapat potongan PTKP malah ndak, nah itu kan gak efisien, seperti itu ya kita jaga disitu jadi efisien disini bukan ngakal-ngakalin biar bayarnya sedikit bukan, kita bayar semestinya tapi kita bisa efisien kalo memang ada aturan-aturan yang baru yang bisa menghemat pengeluaran pembayaran pph

21 seperti kemarin dua tahun yang terakhir ini kan PTKP nya naik terus, nah itu salah satu mbantu saya untuk memperkecil biaya saya untuk biaya pajak pph 21 nya. Jadi setiap ada perubahan peraturan yang memang bisa kita jadikan untuk efisiensi pembayaran ya kita langsung terapkan secepatnya tapi tidak keluar dari aturan yang ada, yang penting itu, kita harus tetep patuh sih dengan peraturan-peraturan yang seharusnya, kalo memang itu bisa dimanfaatkan sesuai aturan ya kita bisa memanfaatkan biar efisien seperti itu jadi biaya kita nggak mbledak terus ya kan.” (Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 14.00 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi perencanaan pajak PT X lebih fokus kepada PTKP masing-masing karyawannya, apabila besaran PTKP tiap karyawan mengalami perubahan maka PT X menghitung kembali PTKP karyawannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di perpajakan.

### **3. Pelaporan SPT Tahunan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT X**

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, Surat Pemberitahuan juga berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran darr pemotong atau pemugut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut :

#### **1. SPT Masa**

2. **SPT Tahunan**, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. Ada dua jenis SPT tahunan, yaitu SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi.

SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri dari 3 jenis :

**a. Formulir SPT Tahunan 1770.** Formulir SPT Tahunan 1770 adalah bentuk formulir SPT tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

- 1) Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan netto
- 2) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- 3) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final
- 4) Dari penghasilan lain

**b. Formulir SPT tahunan 1770 S.** Formulir SPT tahunan 1770 S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan :

- 1) Dari satu atau lebih pemberi kerja
- 2) Dari dalam negeri lainnya; dan/atau
- 3) Yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final

**c. Formulir SPT tahunan 1770 SS.** Formulir SPT tahunan 1770 SS adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun dan tidak

mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank dan/atau bunga koperasi.

Untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, pegawai bersangkutan memerlukan formulir 1721 A1 (bagi pegawai swasta dan BUMN) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri, anggota TNI/polri, pejabat negara dan pensiunannya) yang dikeluarkan oleh tempat dimana pegawai itu bekerja pada akhir masa tahun pajak. Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 tersebut berisi besarnya penghasilan bruto pegawai dan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja atas penghasilan pegawai tersebut selama satu tahun pajak. Sehingga pegawai tidak perlu lagi untuk menghitung sendiri besarnya pajak atas penghasilan yang diterima dari tempatnya bekerja karena sudah dihitung oleh tempat dimana pegawai itu bekerja.

Jadi kelengkapan SPT Tahunan Pegawai atau Karyawan adalah :

1. Induk SPT Tahunan itu sendiri yang terdiri dari Formulir SPT 1770S, formulir SPT 1770S-I dengan formulir SPT 1770S-II
2. Fotokopi formulir 1721 A1 atau A2
3. Daftar susunan keluarga yang menjadi tanggungan Wajib Pajak (dapat berupa fotokopi kartu keluarga atau dibuat daftar lampiran sendiri oleh Pegawai atau Karyawan sesuai dengan keadaannya)

Teori tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh

Bapak Farid selaku staff subdiv perpajakan sebagai berikut :

“Jadi pertanyaannya adalah pph 21 pribadi, aaaaa gimana pelaporan pph 21 pribadi, padahal ada pelaporan spt tahunan pribadi, jadi gini setahu saya kalo pelaporan pph 21 pribadi itu nggak ada, pph 21 itu yang melaporkan itu yang memberikan penghasilan, nah kalo

disini berarti PT X yang memberikan penghasilan nah jadi PT X yang melaporkan, nah pada bulan Desember, PT X itu wajib memberikan form 1721 A1 yang berisi semua total gaji karyawan selama satu tahun, nah form 1721 A1 itulah yang dijadikan lampiran buat SPT tahunan pribadi, jadi yang dilaporkan sama orang pribadi karyawan dalam hal ini ya cuman hasil tahunan dengan lampiran dari e-spt pph 21 jadi nama formnya pun bukan pph 21 pribadi tapi SPT Tahunan sendiri kan formnya beda 1770 S atau SS kan bukan pph 21 pribadi jadinya, setahu saya sih gitu.” (Wawancara Bapak Farid, 26 Mei 2017 pukul 14.15 WIB, di ruang kerjanya)

Hal tersebut juga didukung oleh Bapak Dito selaku staff perpajakan, sebagai berikut

“Setelah karyawan dapat bukti potong 1721 A1 dari kantor, karyawan wajib melaporkan ke kantor pajak secara pribadi eee langsung bukan melalui kantor gitu, bisa langsung ke kpp nya atau melalui e-filling seperti itu, jadi kantor tidak berkewajiban untuk melaporkan eeee spt dari karyawan PT X, seperti itu.” (Wawancara Bapak Mahfud, 26 Mei 2017 pukul 13.15 WIB, di ruang kerjanya)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan oleh pemberi penghasilan, dalam hal ini pemberi penghasilan adalah PT X, adapun PT X memberikan bukti potong berupa form 1721 A1 kepada setiap karyawan, kemudian form tersebut dijadikan lampiran sebagai SPT Tahunan pribadi setiap karyawan, dalam hal ini yang dilaporkan oleh karyawan hanya hasil gaji tahunan yang berupa lampiran e-spt berdasarkan formulir 1770 S atau 1770 SS, kemudian karyawan wajib melaporkan secara mandiri formulir tersebut ke kantor pelayanan pajak pratama dimana karyawan tersebut terdaftar atau secara online melalui e-filling.

#### **4. Rincian Laporan Laba Rugi PT X (Sebelum dan Sesudah Dilakukan Koreksi Fiskal)**

Metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilaksanakan oleh PT X akan berpengaruh pada beban pajak penghasilan badan yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dalam laporan laba rugi sebelum dan sesudah dilakukannya koreksi fiskal perusahaan pada tabel berikut:

**Tabel 8**  
**Laporan Laba Rugi Sebelum dan Sesudah Koreksi Fiskal PT X Tahun 2016**

No	Keterangan	Sebelum Koreksi Fiskal	Sesudah Koreksi Fiskal
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.452.128.372.734</b>	<b>1.452.128.372.734</b>
<b>2</b>	<b>Beban Umam dan Administrasi</b>		
	<b>a. Rumah Dinas</b>		
	1. Biaya Sewa Rumah Dinas	864.782.415	864.782.415
	2. Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas (Jasa)	107.844.833	107.844.833
	3. Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas (Material)	132.643.150	132.643.150
	4. Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Dinas (Jasa)	1.400.000	1.400.000
	5. Biaya Pemeliharaan Inventaris Rumah Dinas (Material)	17.848.150	17.848.150
	6. Biaya Penyusutan Rumah Dinas	34.762.919	34.762.919
	7. Biaya Penyusutan Inventaris Rumah Dinas	66.865.597	66.865.597
	8. Biaya Telepon Luar Kantor / Rumah Dinas	109.564.718	109.564.718
	9. Biaya PDAM Bangunan Lainnya	33.955.775	33.955.775
	10. Biaya Listrik Bangunan Lain	1.404.312.878	1.404.312.878
		<b>2.773.980.435</b>	<b>2.773.980.435</b>
	<b>b. Promosi</b>		
	1. Biaya Promosi	22.312.788.152	8.828.661.391
	2. Biaya Iklan	7.920.225.452	5.396.334.089
	3. Biaya Promosi dan Humas Lain	950.473.027	717.356.250
		<b>31.183.486.631</b>	<b>14.942.351.730</b>
	<b>c. Sumbangan dan CSR</b>		
	1. Biaya Tanggung Jawab Sosial	14.932.154.015	4.200.607.069
	2. Uang Saku Calon Jamaah Haji-Pegawai	66.000.000	66.000.000
	3. Biaya Humas	403.614.298	403.614.298
	4. Sumbangan Kepada Pihak Lain	12.016.281.331	12.016.281.331



No	Keterangan	Sebelum Koreksi Fiskal	Sesudah Koreksi Fiskal
	5. Sumbangan Rutin	153.450.000	153.450.000
	6. Biaya Sumbangan Keamanan	33.975.000	33.975.000
		<b>27.605.474.644</b>	<b>16.873.927.688</b>
	<b>d. Pajak</b>		
	1. Biaya PPh 21 Pegawai	40.057.394.568	40.057.394.568
	2. Biaya PPh Ps. 4 (2) Final	1.066.597.600	1.066.597.600
	3. Biaya Pajak Lainnya	236.992.922	163.770.809
		<b>41.360.985.090</b>	<b>41.287.762.977</b>
	<b>e. Penyusutan</b>		
	1. Biaya Penyusutan Kendaraan Dinas Pejabat	186.128.440	93.064.220
	2. Biaya Penyusutan Handphone	1.402.535	701.267
	3. Biaya Penyusutan Alat Kesenian	10.050.364	10.050.364
	4. Biaya Penyusutan Alat Olahraga	39.470.987	39.470.987
		<b>237.052.325</b>	<b>143.286.837</b>
	<b>f. Pemeliharaan</b>		
	1. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Jasa)	153.138.303	76.569.152
	2. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat (Material)	526.523.948	263.261.974
	3. Biaya Pemeliharaan Alat Kesenian (Jasa)	1.750.000	1.750.000
	4. Biaya Pemeliharaan Alat Kesenian (Material)	1.173.000	1.173.000
	5. Biaya Pemeliharaan Alat Olahraga (Jasa)	3.920.000	3.920.000
	6. Biaya Pemeliharaan Alat Olahraga (Material)	24.446.000	24.446.000
		<b>710.951.251</b>	<b>371.120.125</b>
	<b>g. Pengobatan dan Olahraga</b>		
	1. Biaya Pengobatan Dekom	108.762.705	108.762.705
	2. Biaya Pengobatan Direksi	786.340.463	786.340.463
	3. Biaya Pengobatan Pegawai	13.607.185.655	13.607.185.655
	4. Biaya Pengobatan Lainnya	98.718.431	98.718.431

No	Keterangan	Sebelum Koreksi Fiskal	Sesudah Koreksi Fiskal
	5. Biaya Olahraga Direksi	13.596.786	13.596.786
	6. Biaya Olahraga Pegawai	2.934.969.790	2.934.969.790
	7. Biaya Olahraga Lainnya	549.122.661	549.122.661
		<b>18.098.696.490</b>	<b>18.098.696.490</b>
	<b>h. Premi Asuransi</b>		
	Biaya Premi Asuransi Pesangon	<b>40.475.626.533</b>	<b>40.475.626.533</b>
	<b>i. Jasa Produksi</b>		
	Bonus Pegawai	<b>248.050.890.505</b>	<b>33.192.132.477</b>
	<b>j. Biaya Pegawai</b>		
	1. Biaya Lembur Pegawai	-	-
	2. Biaya Kursus	31.925.000	31.925.000
	3. Biaya Telepon Direksi	9.475.560	4.737.780
	4. Biaya Listrik Direksi	70.272.473	70.272.473
	5. Biaya PDAM Direksi	6.752.060	6.752.060
	6. Biaya Perumahan Direksi	1.104.000.000	1.104.000.000
	7. Biaya Uang Makan Direksi	345.216.101	345.216.101
		<b>1.567.641.194</b>	<b>1.562.903.414</b>
	<b>k. Perjadin</b>		
	1. Biaya SPD Suami/Istri Pegawai Dan Pensiun	1.029.435.219	1.029.435.219
	2. Perjadin Luar Kota Tenaga Alih Daya	3.711.066.588	3.711.066.588
	3. Perjadin Luar Negeri Tenaga Alih Daya	330.000	330.000
		<b>4.740.831.807</b>	<b>4.740.831.807</b>
	<b>l. Hadiah, Souvenir dan Bingkisan</b>		
	1. Biaya Hadiah Piala Pertandingan Olahraga	-	-
	2. Biaya Bingkisan Olahraga	-	-
	3. Biaya Souvenir	7.762.856.858	7.762.856.858
	4. Souvenir Haji	680.185.560	680.185.560

No	Keterangan	Sebelum Koreksi Fiskal	Sesudah Koreksi Fiskal
		<b>8.443.042.458</b>	<b>8.443.042.458</b>
	<b>m. Biaya Umum Lainnya</b>		
	1. Biaya Rapat	4.560.549.101	4.560.549.101
	2. Biaya Jamuan Tamu	7.023.668.434	7.023.668.434
	3. Biaya Umum Lainnya	50.977.912.634	50.399.193.405
	4. Biaya Kegiatan HUT PT X	1.125.938.385	1.125.938.385
	5. Biaya Telepon Selular	1.018.236.502	509.118.251
	6. Biaya Pembelian Koran, Buku, Majalah	1.001.237.425	1.001.237.425
	7. Pelanggaran Lainnya	483.354.710	483.354.710
	8. Biaya Non Oprasional Lainnya	29.189.731.384	28.703.431.051
		<b>95.380.628.576</b>	<b>93.806.490.762</b>
<b>3</b>	<b>Jumlah Beban Umum dan Administrasi</b>	<b>515.888.456.131</b>	<b>276.712.153.733</b>
<b>4</b>	<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>936.239.916.603</b>	<b>1.175.416.219.001</b>
<b>5</b>	<b>Pembulatan Laba Bersih</b>	<b>936.239.916.600</b>	<b>1.175.416.219.000</b>
<b>6</b>	<b>Pajak Penghasilan Badan</b> 25% x 1.175.416.219.000	<b>234.059.979.000</b>	<b>293.854.055.000</b>
<b>7</b>	<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>702.179.937.600</b>	<b>881.562.164.000</b>

Sumber: Laporan Laba Rugi PT X tahun 2016, data diolah Peneliti tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas, pajak penghasilan badan yang harus dibayarkan oleh PT X setelah dilakukannya koreksi fiskal adalah sebesar Rp 293.854.055.000, hal ini berbeda ketika sebelum dilakukan koreksi fiskal , PT X menanggung beban pajak perusahaan sebesar Rp 234.059.979.000. PT X mengalami kenaikan pajak penghasilan badan karena PT X menanggung jumlah pajak terhutang seluruh karyawannya.

### **C. Analisis Data**

#### **1. Dasar Pertimbangan PT X Dalam Menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan**

##### **1.1 Kebijakan PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawannya**

Adapun dasar pertimbangan PT X dalam menanggung pajak penghasilan pasal 21 karyawannya dinalisis berdasarkan hasil wawancara, pajak yang dibayar oleh perusahaan atau pajak yang ditanggung oleh perusahaan secara otomatis direkap dalam angsuran pembayaran PPh Pasal 25 yang telah dilakukan koreksi fiskal, meskipun pada perusahaan terdapat neraca komersial yang dianggap sebagai biaya, akan tetapi pada neraca fiskalnya tidak boleh diakui dan bisa menambah beban pajak, hal ini dianggap tidak menjadi permasalahan selama perusahaan menanggung beban PPh Pasal 21 karyawannya karena PT X membayar pajak karyawannya kurang dari Rp 10.000.000.000 sedangkan untuk beban pajak perusahaannya lebih dari Rp 10.000.000.000. Maka dari itu PT X memilih untuk menanggung seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para

karyawan PT X lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar, kecuali terdapat karyawan yang memiliki penghasilan diluar dari PT X maka pajak dari penghasilannya ditanggung sendiri oleh karyawan tersebut. Akan tetapi dalam hal ini, tenaga honorer dibedakan perhitungan pajak terhutangnya, yang semula dimasukkan kedalam tarif non-pegawai sebesar 50% lalu dirubah dengan potongan sebesar 15% dari penghasilannya, alasan PT X merubah ketentuan tersebut dengan tujuan menghindari pajak kurang bayar yang ditanggung oleh tenaga honorer pada akhir tahun. Perubahan ini telah di diskusikan dengan divisi SDM yang bertugas sebagai penyalur penghasilan tenaga honorer, dengan harapan pajak kurang bayar yang ditanggung tenaga honorer tidak bertambah.

## **1.2 Metode Yang Digunakan Oleh PT X Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan**

Berdasarkan wawancara, PT X mengakui bahwa apabila menanggung beban pajak karyawannya merasakan kerugian, akan tetapi meskipun beban pajak perusahaan semakin bertambah karena perusahaan telah menanggung beban pajak karyawannya, alasan PT X tidak mempermasalahkan adalah dalam menanggung seluruh beban pajak karyawannya dianggap lebih sedikit dibandingkan dengan beban pajak perusahaan dan perhitungan atas pajak terutang tersebut telah di handle oleh karyawan yang berada dalam subdiv perpajakan di PT X. Serta pemberian bonus berupa satu kali gaji yang dilakukan oleh

PT X adalah demi kesejahteraan karyawannya, dengan harapan para karyawan lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dan target dalam pekerjaan bisa dicapai.

## **2. Perencanaan Pajak Yang Efektif Untuk PT X**

### **2.1 Alur Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di PT X**

Berdasarkan hasil wawancara, alur pembayaran PPh Pasal 21 di PT X dibedakan antara pegawai tetap dan pegawai non tetap, pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Apabila pegawai tetap tersebut menerima honor mengajar atau menguji karyawan baru, maka honor tersebut dianggap sebagai penghasilan lain-lain. Sedangkan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Untuk pegawai tetap, yang memberikan gaji adalah bagian divisi SDM dan data dari lampiran gaji tersebut diberikan kepada subdiv perpajakan untuk dihitung pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai, sedangkan untuk pegawai tidak tetap, yang memberikan gaji adalah bagian umum, lalu

data dari divisi SDM dan divisi umum dijadikan satu untuk dilaporkan kepada kantor pajak melalui e-filling.

Hal ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Muljono (2010) pada prinsipnya, pajak atas penghasilan akan terutang pada akhir tahun, baik bagi wajib pajak yang menggunakan tahun buku, tergantung tahun yang dipilih oleh wajib pajak. Namun demikian, untuk memberikan keringanan dan kemudahan pembayaran pajak atas penghasilan, serta prinsip pengenaan pajak pada saat adanya penghasilan, maka besarnya penghasilan yang akan terjadi pada akhir tahun tersebut dapat diperkirakan sejak awal tahun, dan besarnya PPh yang akan terutang pada akhir tahun tersebut pelunasannya dilakukan pada setiap masa bulanan atau pada setiap transaksi, dengan cara dipungut, dipotong hak lain, atau di bayar sendiri oleh wajib pajak. Pada akhir tahun, besarnya PPh yang masih urang dibayar harus dilunasi oleh wajib pajak sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dilaporkan. Adapun pelunasan PPh dilakukan dengan cara membayar PPh yang terutang dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP) pada bank persepsi atau dengan cara lainnya, seperti lewat ATM atau berbagai cara online system serta offline system lainnya.

## **2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di PT X**

Berdasarkan hasil wawancara, perhitungan PPh Pasal 21 di PT X dibedakan antara pegawai tetap dan pegawai non tetap terlebih dahulu. Dalam hal ini, komisaris yang semula dianggap sebagai non-pegawai dirubah menjadi pegawai tetap setelah melihat kriteria di

Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku. Setelah status komisaris di tetapkan sebagai pegawai tetap, maka pajak kurang bayar yang sebelumnya tinggi diharapkan akan berkurang, karena dihitung berdasarkan tarif pegawai tetap. Apabila status komisaris adalah pegawai tidak tetap, maka perhitungan penghasilan kena pajaknya dikalikan 50% terlebih dahulu kemudian disesuaikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Adapun tarif pasal 17 yang dimaksud adalah lapisan Penghasilan Kena Pajak Rp 0 sampai dengan Rp 50.000.000 dikenakan tarif 5%, di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000 dikenakan tarif 15%, di atas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000 dikenakan tarif 25%, dan yang terakhir di atas Rp 500.000.000 dikenakan tarif 30%. Dalam menghitung pajak penghasilan karyawan, PT X menggunakan tarif PTKP terbaru dengan ketentuan Wajib Pajak orang pribadi dikenakan tarif sebesar Rp 54.000.000, apabila Wajib Pajak yang memiliki istri dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 4.500.000, sedangkan istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 54.000.000, lalu Wajib Pajak yang mempunyai anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam satu garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga dikenakan tarif tambahan sebesar Rp 4.500.000. Dengan penggunaan PTKP terbaru maka PT X dapat menghemat sekitar Rp 14.000.000.000 pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 diperkirakan dapat mengalami kenaikan sebesar Rp



6.000.000.000. Dengan dinaikannya PTKP maka pajak penghasilan yang dibayarkan besarannya akan lebih kecil.

Hal ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Mardiasmo (2016), bagi pegawai tetap, besarnya Penghasilan Kena Pajak pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurang PTKP. Sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran-iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Sedangkan bagi pegawai tidak tetap, Penghasilan Kena Pajak sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.

### **2.3 Perencanaan Pajak PPh 21 Yang Dilakukan Oleh PT X**

Berdasarkan wawancara, perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X adalah setiap tahunnya rutin memproses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 secara tepat waktu, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi denda yang disebabkan oleh terlambatnya perhitungan yang berdampak pada terlambatnya pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 serta menghindari lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan pasal 21. Dalam hal melakukan perencanaan pajak penghasilan pasal 21 PT X mengikuti aturan perpajakan yang terbaru,

apabila peraturan tersebut lebih menguntungkan atau memperkecil biaya pajak terhutang maka PT X akan menerapkan peraturan tersebut untuk perencanaan pajaknya, adapun peraturan yang dimaksud seperti kenaikan pada tarif PTKP. Apabila status karyawan mengalami perubahan maka harus segera disesuaikan dengan tarif PTKP dan perhitungan atas PTKP dibantu oleh aplikasi yang mempermudah perhitungan pajaknya.

Hal ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Suandy (2016), hasil dari suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan atau perundang-undangan.

## **2.4 Efisiensi Perencanaan Pajak Yang dilakukan Oleh PT X**

Berdasarkan hasil wawancara, efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X lebih fokus kepada memanfaatkan aturan-aturan yang berlaku di dalam perpajakan seperti definisi dalam PPh Pasal 21 yang ditinjau dengan melihat sisi PTKP terhadap masing-masing karyawannya, apabila besaran PTKP tiap karyawan mengalami perubahan maka PT X menghitung kembali PTKP karyawannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di perpajakan dengan harapan biaya pajak karyawan yang ditanggung oleh PT X dapat

ditekan seminimal mungkin tanpa menyalahgunakan aturan perpajakan.

Hal ini sesuai dengan teori yang di sampaikan oleh Suandy (2016) dengan menganalisis informasi basis data yang ada, hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain di luar pajak yang mungkin terjadi.

### **3. Pelaporan SPT tahunan Yang Dilakukan Oleh Karyawan PT X**

Berdasarkan hasil wawancara, Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan dilaporkan oleh pemberi penghasilan, dalam hal ini pemberi penghasilan adalah PT X, adapun setiap bulan Desember PT X memberikan bukti potong berupa form 1721 A1 kepada setiap karyawan yang berisi total gaji karyawan selama satu tahun, kemudian form tersebut dijadikan lampiran sebagai SPT Tahunan pribadi setiap karyawan, dalam hal ini yang dilaporkan oleh karyawan hanya hasil gaji tahunan yang berupa lampiran e-spt pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan formulir 1770 S atau 1770 SS, kemudian karyawan wajib melaporkan secara mandiri formulir tersebut ke kantor pelayanan pajak pratama dimana karyawan tersebut terdaftar atau secara online melalui e-filing.

Terkait formulir 1721 A1 atau A2 sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Siswandi (2008), untuk mengisi SPT Tahunan PPh Orang

Pribadi, pegawai bersangkutan memerlukan formulir 1721 A1 (bagi pegawai swasta dan BUMN) atau 1721 A2 (bagi pegawai negeri, anggota TNI/polri, pejabat negara dan pensiunannya) yang dikeluarkan oleh tempat dimana pegawai itu bekerja pada akhir masa tahun pajak. Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 tersebut berisi besarnya penghasilan bruto pegawai dan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan atau pemberi kerja atas penghasilan pegawai tersebut selama satu tahun pajak. Sehingga pegawai tidak perlu lagi untuk menghitung sendiri besarnya pajak atas penghasilan yang diterima dari tempatnya bekerja karena sudah dihitungkan oleh tempat dimana pegawai itu bekerja.

Sedangkan terkait formulir 1770 S (Sederhana) dan 1770 SS (Sangat Sederhana) sesuai dengan teori yang disampaikan oleh TMBooks (2013), dimana Formulir SPT tahunan 1770 S adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dari dalam negeri lainnya dan yang dikenakan PPh Final atau bersifat final. Serta formulir SPT tahunan 1770 SS adalah bentuk formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dengan jumlah penghasilan bruto dari pekerjaan tidak lebih dari Rp 60.000.000,00 setahun dan tidak mempunyai penghasilan lain kecuali penghasilan berupa bunga bank atau bunga koperasi.

#### 4. Perbandingan Tiga Metode Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan di PT X

Peneliti membandingkan tiga metode yang terdapat dalam perhitungan pajak yang ditanggung perusahaan, yaitu pajak terhutang dibayar oleh karyawan (*gross method*), pajak terhutang ditanggung oleh pemberi kerja (*net method*) dan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawan (*gross up method*), tujuan peneliti membandingkan tiga metode ini adalah untuk mencari metode mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dalam pembayaran pajak terhutangnya. Berikut hasil perbandingan perhitungan menggunakan tiga metode tersebut :

**Tabel 9**

#### **Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Menggunakan Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 (Dalam Rupiah)**

<b>Keterangan</b>	<b>Gross Method</b>
Pendapatan	1.452.128.372.734
Jumlah Beban Umum	236.654.759.190
Laba Sebelum Pajak	1.215.473.613.554
Pajak Penghasilan Badan 25% x 1.215.473.613.554	303.864.403.000
Laba Bersih Setelah Pajak	911.605.210.000

Pada tabel ini dijelaskan bahwa pendapatan PT X pada tahun 2016 sebesar RP 1.452.128.372.734, besaran pendapatan tersebut sesuai dengan pendapatan yang tertera pada tabel 8 laporan laba rugi sebelum dan sesudah koreksi fiskal. Pada keterangan jumlah beban umum, hasil tersebut diperoleh melalui simulasi perhitungan penjumlahan poin A sampai dengan poin M, akan tetapi pada poin D besaran Rp 40.057.394.568 di hilangkan karena

pajak penghasilan telah di tanggung masing-masing karyawan, maka total jumlah beban umum menjadi Rp 236.654.759.190. Lalu pada keterangan laba sebelum pajak diperoleh dari Rp 1.452.128.372.734 – Rp 236.654.759.190 = Rp 1.215.473.613.554. Dari hasil tersebut di kalikan dengan 25% maka di peroleh pajak penghasilan badan sebesar Rp 303.864.403.000. Maka untuk memperoleh laba bersih setelah pajak, laba bersih sebelum pajak dikurangkan dengan pajak penghasilan badan dengan nominal Rp 1.215.473.613.554 – Rp 303.864.403.000 = Rp 911.605.210.000.

<b>Keterangan</b>	<b>Net Method</b>
Pendapatan	1.452.128.372.734
Jumlah Beban Umum	276.712.153.733
Laba Sebelum Pajak	1.175.416.219.000
Pajak Penghasilan Badan 25% x 1.175.416.219.000	293.854.055.000
Laba Bersih Setelah Pajak	881.562.164.000

Pada tabel ini dijelaskan bahwa pendapatan PT X pada tahun 2016 sebesar RP 1.452.128.372.734, besaran pendapatan tersebut sesuai dengan pendapatan yang tertera pada tabel 8 laporan laba rugi sebelum dan sesudah koreksi fiskal. Pada keterangan jumlah beban umum, hasil tersebut diperoleh melalui simulasi sesuai dengan perhitungan penjumlahan poin A sampai dengan poin M, karena pajak penghasilan telah di tanggung perusahaan, maka total jumlah beban umum menjadi Rp 276.712.153.733. Lalu pada keterangan laba sebelum pajak diperoleh dari Rp 1.452.128.372.734 – Rp 276.712.153.733 = Rp 1.175.416.219.001. Dari hasil tersebut di kalikan dengan 25% maka di peroleh pajak penghasilan badan sebesar Rp

293.854.055.000. Maka untuk memperoleh laba bersih setelah pajak, laba bersih sebelum pajak dikurangkan dengan pajak penghasilan badan dengan nominal  $\text{Rp } 1.175.416.219.000 - \text{Rp } 293.854.055.000 = \text{Rp } 881.562.164.000$ .

<b>Keterangan</b>	<b>Gross Up Method</b>
Pendapatan	1.452.128.372.734
Jumlah Beban Umum	316.779.512.301
Laba Sebelum Pajak	1.135.348.860.433
Pajak Penghasilan Badan 25% x 1.135.348.860.433	283.837.215.000
Laba Bersih Setelah Pajak	851.511.645.433

Pada tabel ini dijelaskan bahwa pendapatan PT X pada tahun 2016 sebesar RP 1.452.128.372.734, besaran pendapatan tersebut sesuai dengan pendapatan yang tertera pada tabel 8 laporan laba rugi sebelum dan sesudah koreksi fiskal. Pada keterangan jumlah beban umum, hasil tersebut diperoleh melalui simulasi dengan perhitungan penjumlahan poin A sampai dengan poin M, akan tetapi pada poin J di tambah dengan Rp 40.057.394.568 karena perusahaan memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawannya, maka total jumlah beban umum menjadi Rp 316.779.512.301. Lalu pada keterangan laba sebelum pajak diperoleh dari  $\text{Rp } 1.452.128.372.734 - \text{Rp } 316.779.512.301 = \text{Rp } 1.135.348.860.433$ . Dari hasil tersebut di kalikan dengan 25% maka di peroleh pajak penghasilan badan sebesar Rp 283.837.215.000. Maka untuk memperoleh laba bersih setelah pajak, laba bersih sebelum pajak dikurangkan dengan pajak penghasilan badan dengan nominal  $\text{Rp } 1.135.348.860.433 - \text{Rp } 283.837.215.000 = \text{Rp } 851.511.645.433$ .

Kesimpulan dari hasil perbandingan perhitungan ketiga metode diatas, diketahui bahwa metode yang paling meminimalisir beban pajak perusahaan dan yang paling menguntungkan antar perusahaan dan karyawan adalah metode *Gross Up* dimana dalam metode tersebut perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan dihitung terlebih dahulu melalui rumus *Gross Up Method* untuk mendapatkan nominal tunjangan pajak yang sesuai, dan pada saat akhir tahun karyawan membayar pajak terhutang sesuai dengan jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan.

## **5. Penerapan Perencanaan Pajak Melalui Tiga Metode Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Karyawan PT X**

Menurut Suandy (2014), perencanaan pajak merupakan salah satu unsur dan langkah awal dalam manajemen pajak. Perusahaan dapat melakukan manajemen pajak sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses perencanaan pajak sendiri baru dapat dilakukan setelah peneliti memiliki seluruh data yang diperlukan yang diperoleh dari perusahaan. Pada penelitian ini, data yang dianalisis adalah rincian gaji seluruh karyawan tetap untuk memperhitungkan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan. Melalui data yang diperoleh, peneliti melakukan perencanaan pajak sebagai upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan tanpa mengurangi kesejahteraan karyawan. Berikut merupakan hasil perhitungan dari salah satu karyawan PT X dengan menggunakan tiga



metode yang terdapat di pajak penghasilan pasal 21 yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan perencanaan pajak :

**a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan *Gross Method***

*Gross Method* merupakan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, dengan cara karyawan menanggung sendiri beban pajak terutangnya. Perusahaan secara otomatis akan memotong penghasilan karyawannya apabila menggunakan metode ini. Perhitungan *Gross Method* adalah sebagai berikut :

**Tabel 10 Perhitungan *Gross Method***

No	Keterangan	Nominal	Jumlah
1	Gaji Pokok	(12 x 19.916.987)	239.003.844
2	Pengurang : a. Biaya Jabatan b. Premi Atek c. Premi Pensiun d. BPJS	500.000 300.489 262.929 80.000 <u>(1.143.418 x 12)</u>	     <u>13.721.016</u> 225.258.828
3	PTKP (K/2) Wajib Pajak Tanggungan Istri Tanggungan Anak (2)	54.000.000 4.500.000 9.000.000	   <u>67.500.000</u> 157.782.828
4	PhKP Setahun 5% x 50.000.000 15% x 107.782.828	2.500.000 16.167.424,2	  18.667.424,2
5	PPh Pasal 21 Sebulan		1.555.618,7
6	PPh Pasal 21 Setahun		18.667.424,2
7	PPh Pasal 21 Sebulan		1.555.618,7

Berdasarkan perhitungan tabel 4.3 dapat dijelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 21 yang ditanggung atas penghasilan yang diterima oleh karyawan adalah sebesar Rp 18.667.424,2 per tahun atau Rp 1.555.618,7 per bulan dari total penghasilan bruto karyawan tersebut. Perusahaan tidak akan dirugikan dalam pembayaran pajak terhutang terhadap karyawannya karena dengan metode ini, keseluruhan pajak terhutangnya telah dibayarkan oleh karyawan.

**b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Net Method***

*Net Method* merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan cara perusahaan menanggung seluruh beban pajak karyawannya. Dan PT X memilih metode ini sebagai kebijakan perusahaan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 karyawan, karena dianggap tidak membebani para karyawannya dalam membayar dan menghitung kembali pajak terhutang atas masing-masing karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *Net Method* adalah sebagai berikut :

**Tabel 11 Perhitungan *Net Method***

No	Keterangan	Nominal	Jumlah
1	Gaji Pokok	(12 x 19.916.987)	239.003.844
2	Pengurang : a. Biaya Jabatan b. Premi Atek c. Premi Pensiun d. BPJS	500.000 300.489 262.929 80.000 <hr/> (1.143.418 x 12)	13.721.016 <hr/> 225.258.828
3	PTKP (K/2) Wajib Pajak	54.000.000	

No	Keterangan	Nominal	Jumlah
	Tanggungan Istri	4.500.000	
	Tanggungan Anak (2)	9.000.000	<u>67.500.000</u>
			157.782.828
4	PhKP Setahun 5% x 50.000.000 15% x 107.782.828	2.500.000 16.167.424,2	18.667.424,2
5	PPh Pasal 21 Sebulan		1.555.618,7
6	PPh Pasal 21 Setahun		18.667.424,2
7	PPh Pasal 21 Sebulan		1.555.618,7

Berdasarkan perhitungan tabel 4.4 dapat dijelaskan bahwa pajak penghasilan pasal 21 karyawan ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp 18.667.424,2 per tahun dan Rp 1.555.618,7 per bulan. Namun biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak perusahaan. Sehingga, biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut akan terkena koreksi fiskal.

Metode ini memang tidak akan membuat penghasilan yang dibawa pulang karyawan berkurang akibat dipotong pajak penghasilan, namun bagi perusahaan akan mengalami kerugian karena laba fiskal perusahaan akan menjadi lebih besar. Sehingga pajak penghasilan perusahaan juga akan menjadi lebih besar.

#### c. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Menggunakan *Gross Up Method*

*Gross Up Method* merupakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21, dengan cara perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawannya yang menggunakan rumus *Gross Up Method*

untuk mendapatkan nominal tunjangan pajak yang sesuai dan jumlahnya sama dengan jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang. Selain memberikan tunjangan, perusahaan juga bertugas dalam memotong penghasilan karyawan untuk membayar pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan *Gross Up Method* adalah sebagai berikut :

**Tabel 12 Perhitungan *Gross Up Method***

No	Keterangan	Nominal	Jumlah
1	Gaji Pokok Tunjangan Pajak	(12 x 19.916.987)	239.003.844 <u>21.961.675,5</u> 260.965.520
2	Pengurang : a. Biaya Jabatan b. Premi Atek c. Premi Pensiun d. BPJS	500.000 300.489 262.929 <u>80.000</u> (1.143.418 x 12)	    <u>13.721.016</u> 247.244.504
3	PTKP (K/2) Wajib Pajak Tanggungan Istri Tanggungan Anak (2)	54.000.000 4.500.000 9.000.000	  <u>67.500.000</u> 179.744.504
4	PhKP Setahun 5% x 50.000.000 15% x 129.744.504	2.500.000 19.461.675,5	  21.961.675,5
5	PPh Pasal 21 Sebulan		1.830.139,6
6	Tunjangan Pajak		21.961.675,5
7	PPh Pasal 21 Setahun		0
8	PPh Pasal 21 Sebulan		0

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.6 dijelaskan jika perusahaan memberikan tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* maka jumlah tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama besarnya dengan

jumlah Pajak Penghasilan karyawan yaitu sebesar Rp 21.961.675,5 dalam satu tahun dan Rp 1.830.139,6 dalam satu bulan. Sehingga penghasilan yang diterima karyawan tidak akan berkurang akibat dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan juga dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak Pajak perusahaan. Jumlah pajak penghasilan pasal 21 tersebut sama dengan jumlah tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan. Perhitungan tunjangan pajak agar sama hasilnya dengan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan Pajak} &= \frac{(15\% \times \text{PhKP}) - 5.000.000}{0,85} \\
 &= \frac{(15\% \times \text{Rp } 157.782.828) - 5.000.000}{0,85} \\
 &= \frac{23.667.424,2 - 5.000.000}{0,85} \\
 &= 21.961.675
 \end{aligned}$$

#### **d. Perbandingan Perhitungan Tiga Metode Dalam Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan**

Peneliti membandingkan tiga metode yang terdapat dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, yaitu pajak terutang dibayar oleh karyawan (*gross method*), pajak terutang ditanggung oleh pemberi kerja (*net method*) dan pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawan (*gross up method*), tujuan peneliti membandingkan tiga metode ini adalah untuk mencari metode mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan dan juga karyawan. Berikut hasil perbandingan perhitungan menggunakan tiga metode tersebut :

Tabel 13

## Perbandingan Antar Tiga Metode Perhitungan Pajak

## Penghasilan Pasal 21 Karyawan

No	Keterangan	Gross Method	Net Method	Gross Up Method
1	Gaji Pokok Tunjangan Pajak	239.003.844 -	239.003.844 -	239.003.844 21.961.675 <u>260.965.520</u>
2	Pengurang : a. Biaya Jabatan b. Premi Atek c. Premi Pensiun d. BPJS	    <u>13.721.016</u> 225.258.828	    <u>13.721.016</u> 225.258.828	    <u>13.721.016</u> 247.244.504
3	PTKP (K/2) Wajib Pajak Tanggungan Istri Tanggungan Anak (2)	   <u>67.500.000</u> 157.782.828	   <u>67.500.000</u> 157.782.828	   <u>67.500.000</u> 179.744.504
4	PhKP Setahun	18.667.424,2	18.667.424,2	21.961.675,5
5	PPh Pasal 21 Sebulan	1.555.618,7	1.555.618,7	1.830.139,6
6	Tunjangan Pajak	-	-	21.961.675,5
7	PPh Pasal 21 Setahun	18.667.424,2	18.667.424,2	-
8	PPh Pasal 21 Sebulan	1.555.618,7	1.555.618,7	-

Dari hasil perbandingan perhitungan ketiga metode diatas, diketahui bahwa metode yang paling meminimalisir beban pajak perusahaan dan yang paling menguntungkan antar perusahaan dan karyawan adalah metode *Gross Up* dimana dalam metode tersebut,

perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan dihitung terlebih dahulu melalui rumus *Gross Up Method* untuk mendapatkan nominal tunjangan pajak yang sesuai, dan pada saat akhir tahun, karyawan membayar pajak terhutang sesuai dengan jumlah tunjangan yang diberikan perusahaan. Maka perusahaan tidak perlu membayar pajak karyawannya kepada kantor pelayanan pajak, karena dengan perusahaan memberikan tunjangan kepada karyawan, maka biaya tersebut tidak dianggap sebagai biaya pajak perusahaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perencanaan pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada jasa perbankan, maka peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Dasar pertimbangan PT X dalam menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya yang pertama adalah PT X memilih untuk menanggung seluruh beban pajak karyawannya, dengan harapan para karyawan PT X lebih fokus dalam bekerja dan mencapai target dengan imbalan mendapatkan gaji bersih yang sesuai tanpa memikirkan beban pajak yang harus di bayar, serta pemberian bonus berupa satu kali gaji dilakukan oleh PT X dengan tujuan demi kesejahteraan karyawannya.
2. Perencanaan pajak yang efektif untuk PT X dimana setiap tahunnya PT X rutin memproses perhitungan pajak penghasilan pasal 21 secara tepat waktu, hal ini dilakukan untuk menghindari potensi denda yang disebabkan oleh terlambatnya perhitungan yang berdampak pada terlambatnya pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 serta menghindari lebih bayar dan kurang bayar pajak penghasilan pasal 21, serta efisiensi perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X lebih fokus kepada memanfaatkan aturan-aturan yang berlaku di dalam perpajakan seperti



definisi dalam PPh Pasal 21 yang ditinjau dengan melihat sisi PTKP terhadap masing-masing karyawannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka penghematan beban pajak penghasilan karyawan dan perusahaan, antara lain :

1. Sebenarnya menurut laporan laba rugi di PT X, PT X menggunakan metode *Gross* karena pada laporan tersebut beban biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan diinput dalam pengurangan laba rugi. Apabila PT X menggunakan *Net Method* seharusnya tidak diperbolehkan menginput beban biaya tersebut ke dalam laporan laba rugi. Saran dari peneliti, biaya pajak penghasilan pasal 21 karyawan tersebut harus dihapuskan apabila PT X menggunakan *Net Method*.
2. Dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, lebih baik PT X menggunakan metode *Gross Up*, dikarenakan hasil dari perhitungan menggunakan metode ini lebih menguntungkan bagi karyawan dan juga menghemat beban pajak perusahaan. Dan diinput ke dalam poin biaya pegawai dengan nama akun tunjangan pajak penghasilan pasal 21 karyawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, W. John. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Latumaerissa, Julius. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Novayanti, Debora. 2012. *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan (Studi Kasus PT. A)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Strategi Melakukan Riset Kuantitatif, Kualitatif, Gabungan*. Yogyakarta: Andi.
- Sholihin, Amarus. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 Pada Karyawan Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak di PT. Garam Persero (Tbk) Surabaya*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional.
- Siswandi, Dwi Wahyu. 2008. *Panduan Praktis Mengisi SPT Tahunan PPh*. Jakarta: Sun Raybooks.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.
- Susyanti, Jeni. Dahlan, Ahmad. 2015. *Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi*. Malang: Empat Dua Media.

Suyanto dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta: Kencana.

TMBooks. 2013. *Mengisi SPT Sendiri Why Not?*. Yogyakarta: Andi Offset.

Wafa, Imam Ali. 2013. *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan (Studi Kasus Pada PDAM Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jember: Universitas Jember.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.

Zuriah, Nurul. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.